



**SEKRETARIAT  
DAERAH**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029**

**KANTOR BUPATI SIGI**

**Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunianya yang tak terduga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Penyusunan Perencanaan Strategis ini mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Sigi tahun 2025-2029.

Dalam Menyusun Review Rencana strategi (Renstra) ini dilakukan sesuai dengan agenda penyusunan kebijakan Anggaran serta merupakan komitmen bagi seluruh bagian yang ada dilingkungan Setda Kab . Sigi dalam mencapai sasaran dan program kegiatan 5 tahun kedepan.

Renstra Sekretariat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan acuan untuk lima tahun kedepan (2025-2029) serta menjadi komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang lebih baik.



## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                       | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                           | iii |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                         | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                   | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                                  | 1   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                                | 4   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                                           | 5   |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS<br>PERANGKAT DAERAH.....                                        | 7   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....                                                                     | 8   |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....                                                                                     | 23  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Daerah.....                                                                                         | 29  |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....                                                                                        | 32  |
| 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                                                 | 33  |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                                                | 53  |
| 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun<br>2025-2029.....                                  | 53  |
| 3.2 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 ..                                                 | 55  |
| 3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-<br>2029 .....                                    | 59  |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                                 | 63  |
| 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sigi Tahun 2025-2029 .....                      | 63  |
| 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030..... | 65  |



|                     |                                                                                                                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3                 | Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas<br>Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat Kabupaten Sigi Tahun 2025-<br>2029 ..... | 94 |
| 4.4                 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sigi Tahun 2025-2029 .....                                            | 94 |
| BAB V PENUTUP ..... |                                                                                                                                             | 97 |





## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.....                                                                    | 24 |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Berdasarkan<br>Pangkat Golongan.....                                    | 24 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Berdasarkan<br>Tingkat Pendidikan.....                                  | 25 |
| Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi                                                             |    |
| Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.....                            | 30 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.....                            | 30 |
| Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.....                    | 31 |
| Tabel 2.8 Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sigi.....                                                     | 43 |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Sekretariat Daerah Kab. Sigi<br>Tahun 2025-2029.....                                          | 54 |
| Tabel.3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi<br>Tahun 2025-2029.....                                         | 58 |
| Tabel. 4.1 Program dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sigi Tahun 2025-2029.....                                 | 60 |
| Tabel.4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan<br>Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun<br>2026-2030..... | 62 |



|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel. 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas<br>Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sigi Tahun 2025-2029..... | 90 |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....                                                   | 90 |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....                                                   | 92 |





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat Daerah ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-



- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
  22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.
2. Menyelaraskan Dokumen Perencanaan antara RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025-2029 dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Periode 2025-2029
3. Mengarahkan kesesuaian penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan dokumen yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahunan;
2. Sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi,



melaksanakan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2025-2029.

3. Mereview perencanaan awal 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada kondisi sekarang dan yang akan datang yang memuat visi-misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan, target / indikator outcome, indikator output dan penganggaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan secara ringkas mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan. Fungsi Perencanaan Strategis Sekretariat daerah kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, dengan RPJMD, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD. Perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi memuat landasan hukum; Penjelasan Tentang Undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD**

###### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD

###### **2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

###### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya



seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Mengemukakan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

#### 3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Setda Provinsi Sulteng

Menguraikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri ataupun Renstra Setda provinsi Sulteng.

#### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: 1) gambaran pelayanan OPD; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD.



## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah kabupaten Sigi**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran pernyataan dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan menjadi arah serta acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan bagaimana kesimpulan dari rencana strategis sekretariat daerah kabupaten Sigi secara keseluruhan.





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Sekretariat Daerah meliputi:

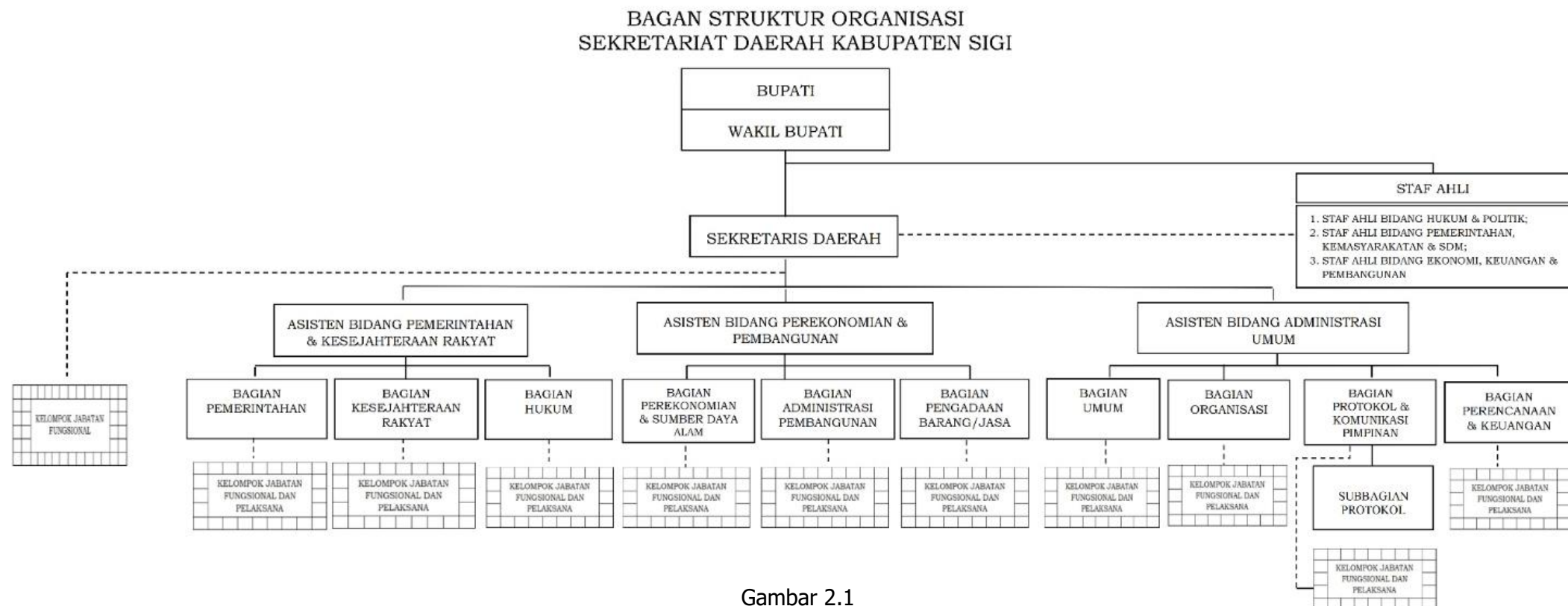
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:
  1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
    - a) Subbagian Protokol; dan



- b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Staf Ahli Bupati terdiri atas:
  - 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.



PERATURAN BUPATI SIGI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN  
2021 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



### **Uraian Tugas**

- 1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, pertanahan, persandian dan statistik dan kerjasama;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;



- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas;

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum;

a) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah. Uraian tugas Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;



- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:



- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang meliputi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, kebudayaan, pariwisata, pertanian, pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perikanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan badan usaha Daerah;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas;

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b. Bagian Administrasi Pembangunan
- c. Bagian Pengadaan dan Jasa



a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian, dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan



pelaporan. Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan operasional dibidang



- pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. pembinaan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  - e. pengkajian dan penyusunan laporan dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Asisten Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang kepegawaian, keuangan, pendapatan, pengawasan, kearsipan, dan perpustakaan;
  - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan;



- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas;

- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Organisasi;
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- a) Bagian Umum
- Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi



pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- 4) Staf Ahli Bupati, terdiri Atas:
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
    - a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai hukum dan politik. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi :
      1. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah- masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang Hukum dan Politik; dan
      2. melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang Hukum dan Politik secara konseptual.
    - b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
      1. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah- masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan



2. melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia secara konseptual.
- c) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  1. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah- masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
  2. melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan secara konseptual.
- 5) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumber daya yang dimiliki



oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi**

| No. | Status Kepegawaian                                | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1   | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                        | 51        | 51        | 102    |
| 2   | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)                 | 13        | 13        | 26     |
| 3   | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 8         | 6         | 14     |
| 4   | Tenaga Kontrak                                    | 77        | 59        | 136    |
|     | TOTAL :                                           | 149       | 129       | 278    |

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 278 orang, terdiri dari 149 laki-laki (54%) dan 129 perempuan (46%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai Laki-laki masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Berdasarkan Pangkat Golongan**

| No. | Status Kepegawaian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|
|     | Golongan IV        |           |           |        |
|     | IV/d               | 1         |           | 1      |
|     | IV/c               | 1         | 2         | 3      |
|     | IV/b               | 1         | 2         | 3      |
|     | IV/a               | 5         | 4         | 9      |
|     | Golongan III       |           |           | 0      |
|     | III/d              | 10        | 9         | 19     |
|     | III/c              | 2         | 10        | 12     |
|     | III/b              | 10        | 11        | 21     |



|  |              |    |    |     |
|--|--------------|----|----|-----|
|  | III/a        | 22 | 17 | 39  |
|  | Golongan III |    |    | 0   |
|  | II/d         | 2  | 2  | 4   |
|  | II/c         | 7  | 3  | 10  |
|  | II/b         | 5  | 2  | 7   |
|  | II/a         |    |    | 0   |
|  | Golongan IX  | 6  | 8  | 14  |
|  | TOTAL :      | 72 | 70 | 142 |

Pada Tabel 2.2, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Status Kepegawaian | PNS |    | CPNS |    | PPPK |   | NON ASN |    | JUMLAH |
|----|--------------------|-----|----|------|----|------|---|---------|----|--------|
|    |                    | L   | P  | L    | P  | L    | P | L       | P  |        |
| 1  | SMP Sederajat      |     |    |      |    |      |   |         |    | 0      |
| 2  | SMA Sederajat      | 18  | 10 |      |    |      |   | 57      | 31 | 116    |
| 3  | D3                 | 4   | 1  |      |    |      |   |         | 2  | 7      |
| 4  | S1                 | 26  | 29 | 13   | 13 | 6    | 8 | 18      | 25 | 138    |
| 5  | S2                 | 7   | 9  |      |    |      |   | 1       |    | 17     |
| 6  | S3                 |     |    |      |    |      |   |         |    | 0      |

Pada Tabel 2.3, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 138 orang (49%) berpendidikan sarjana (S-1) dan 17 orang (6%) telah melanjutkan ke jenjang pascasarjana (S-2). Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi termasuk



berkualifikasi tinggi dan memiliki potensi untuk ditempatkan pada peran-peran strategis atau pengambilan keputusan.

**b. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)**

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada berikut.

**Tabel 2.4**

**Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana              | Satuan | Kondisi |             |       |        | Jumlah |
|----|-----------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|    |                                         |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak | Hilang |        |
| 1  | A.C. Split                              | Unit   | 20      | 0           | 0     | 0      | 20     |
| 2  | A.C. Window                             | Unit   | 21      | 0           | 0     | 0      | 21     |
| 3  | Alat Pemadam Kebakaran lainnya          | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 4  | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar    | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 5  | Alat Pemadam/Portable                   | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 6  | Amplifier                               | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 7  | Audio Mixing Console                    | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 8  | Bangku Tunggu                           | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 9  | Buffet Kayu                             | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 10 | Camera Video                            | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |
| 11 | CCTV - Camera Control Television System | Unit   | 5       | 0           | 0     | 0      | 5      |
| 12 | Dispencer                               | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 13 | Dispenser                               | Unit   | 16      | 0           | 0     | 0      | 16     |
| 14 | electric generating set lainnya (dst)   | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 15 | Exhaust Fan                             | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 16 | External/ Portable Hardisk              | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 17 | Filing Cabinet Besi                     | Unit   | 15      | 0           | 0     | 0      | 15     |
| 18 | Gambar Presiden/Wakil Presiden          | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 19 | Genset                                  | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 20 | Gerobak Dorong                          | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 21 | Gordyin/Kray                            | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |
| 22 | Handy Cam                               | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 23 | Handy Talky (HT)                        | Unit   | 9       | 0           | 0     | 0      | 9      |
| 24 | Karpet                                  | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 25 | Kasur/Spring Bed                        | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 26 | Keyboard (Peralatan Mainframe)          | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 27 | Kipas Angin                             | Unit   | 17      | 0           | 0     | 0      | 17     |

**RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2025-2029**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana                                                               | Satuan | Kondisi |             |       |        | Jumlah |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|    |                                                                                          |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak | Hilang |        |
| 28 | Kursi Besi/Metal                                                                         | Unit   | 454     | 0           | 0     | 0      | 454    |
| 29 | Kursi Fiber Glas/Plastik                                                                 | Unit   | 934     | 0           | 0     | 0      | 934    |
| 30 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 31 | Kursi Kayu                                                                               | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 32 | Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota                                             | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |
| 33 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural                                                       | Unit   | 700     | 0           | 0     | 0      | 700    |
| 34 | Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota                  | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 35 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                                                           | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 36 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                                                            | Unit   | 65      | 0           | 0     | 0      | 65     |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat lainnya                                                              | Unit   | 40      | 0           | 0     | 0      | 40     |
| 38 | Kursi Lipat                                                                              | Unit   | 24      | 0           | 0     | 0      | 24     |
| 39 | Kursi Putar                                                                              | Unit   | 25      | 0           | 0     | 0      | 25     |
| 40 | Kursi Rapat                                                                              | Unit   | 60      | 0           | 0     | 0      | 60     |
| 41 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota    | Unit   | 6       | 0           | 0     | 0      | 6      |
| 42 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf                                                           | Unit   | 100     | 0           | 0     | 0      | 100    |
| 43 | Kursi Tamu                                                                               | Unit   | 9       | 0           | 0     | 0      | 9      |
| 44 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II                                                  | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 45 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya                                                    | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |
| 46 | Lambang Negara (Garuda)                                                                  | Unit   | 5       | 0           | 0     | 0      | 5      |
| 47 | Lap Top                                                                                  | Unit   | 90      | 0           | 19    | 0      | 109    |
| 48 | LCD Projector/Infocus                                                                    | Unit   | 5       | 0           | 0     | 0      | 5      |
| 49 | Lemari Arsip Pejabat lainnya                                                             | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 50 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis                                                    | Unit   | 23      | 0           | 0     | 0      | 23     |
| 51 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota            | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 52 | Lemari Es                                                                                | Unit   | 11      | 0           | 0     | 0      | 11     |
| 53 | Lemari Kayu                                                                              | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 54 | Lemari Sorok                                                                             | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 55 | Loudspeaker                                                                              | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 56 | Meja 1/2 Biro                                                                            | Unit   | 17      | 0           | 0     | 0      | 17     |
| 57 | Meja Kerja Kayu                                                                          | Unit   | 45      | 0           | 0     | 0      | 45     |
| 58 | Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota                   | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 59 | Meja Kerja Pejabat Eselon II                                                             | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |



# RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

| No | Jenis Sarana dan Prasarana                  | Satuan | Kondisi |             |       |        | Jumlah |
|----|---------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|    |                                             |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak | Hilang |        |
| 60 | Meja Komputer                               | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 61 | Meja Makan Besi                             | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 62 | Meja Rapat                                  | Unit   | 34      | 0           | 0     | 0      | 34     |
| 63 | Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 64 | Meja Rapat Pejabat Eselon II                | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 65 | Meja Tambahan                               | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 66 | Mesin Absensi                               | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |
| 67 | Mesin Bor                                   | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 68 | Mesin Cuci                                  | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 69 | Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer            | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 70 | Mesin Gerinda                               | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 71 | Mesin Las Listrik                           | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 72 | Mesin Pemotong Rumput                       | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 73 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner         | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 74 | Meubeler lainnya                            | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 75 | Microphone                                  | Unit   | 35      | 0           | 0     | 0      | 35     |
| 76 | Microphone Floor Stand                      | Unit   | 5       | 0           | 0     | 0      | 5      |
| 77 | Microphone/Boom Stand                       | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 78 | Microphone/Wireless MIC                     | Unit   | 6       | 0           | 0     | 0      | 6      |
| 79 | Mimbar/Podium                               | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 80 | Note Book                                   | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 81 | P.C Unit                                    | Unit   | 10      | 0           | 0     | 0      | 10     |
| 82 | Papan Pengumuman                            | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 83 | Peralatan Las Listrik                       | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 84 | Peralatan Personal Komputer lainnya         | Unit   | 7       | 0           | 0     | 0      | 7      |
| 85 | Pompa Air                                   | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 86 | Power Supply Microphone                     | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 87 | Printer (Peralatan Personal Komputer)       | Unit   | 39      | 0           | 0     | 0      | 39     |
| 88 | Scanner (Peralatan Personal Komputer)       | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 89 | Sofa                                        | Unit   | 27      | 0           | 0     | 0      | 27     |
| 90 | Sound System                                | Unit   | 15      | 0           | 0     | 0      | 15     |
| 91 | Stabilisator                                | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 92 | Tablet PC                                   | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 93 | Tangga Aluminium                            | Unit   | 4       | 0           | 0     | 0      | 4      |
| 94 | Telephone Mobile                            | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 95 | Televisi                                    | Unit   | 6       | 0           | 0     | 0      | 6      |
| 96 | Tempat Tidur Besi                           | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 97 | Tempat Tidur Kayu                           | Unit   | 5       | 0           | 0     | 0      | 5      |
| 98 | Tenda                                       | Unit   | 137     | 0           | 0     | 0      | 137    |
| 99 | Thermos Air                                 | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |



| No  | Jenis Sarana dan Prasarana         | Satuan | Kondisi |             |       |        | Jumlah |
|-----|------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|     |                                    |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak | Hilang |        |
| 100 | Tripod Camera                      | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 101 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 102 | White Board                        | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 103 | Wireless                           | Unit   | 8       | 0           | 0     | 0      | 8      |
| 104 | Bangunan Gedung Kantor Permanen    | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 105 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |
| 106 | Bangunan Parkir Terbuka            | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 107 | Bangunan Pengamanan Sungai         | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 108 | Kursi Hadap                        | Unit   | 14      | 0           | 0     | 0      | 14     |
| 109 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II      | Unit   | 16      | 0           | 0     | 0      | 16     |
| 110 | Meja Kerja Bupati                  | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 111 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural  | Unit   | 36      | 0           | 0     | 0      | 36     |
| 112 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV       | Unit   | 15      | 0           | 0     | 0      | 15     |
| 113 | Meja Kerja Pejabat Eselon III      | Unit   | 9       | 0           | 0     | 0      | 9      |
| 114 | Meja Resepsionis                   | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 115 | Mic Conference                     | Unit   | 2       | 0           | 0     | 0      | 2      |
| 116 | Power Amplifier                    | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 117 | Selasar                            | Unit   | 1       | 0           | 0     | 0      | 1      |
| 118 | Sepeda Motor                       | Unit   | 76      | 0           | 0     | 0      | 76     |
| 119 | Station Wagon                      | Unit   | 32      | 0           | 0     | 0      | 32     |
| 120 | Vacuum Cleaner                     | Unit   | 3       | 0           | 0     | 0      | 3      |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Daerah

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi menyusun dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. sebagai berikut:



**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi**

| No | Indikator                                                | Satuan | Baseline   | Target Tahun |       |       |             |             |             | Ket |
|----|----------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
|    |                                                          |        | Tahun 2024 | 2025         | 2026  | 2027  | 2028        | 2029        | 2030        |     |
| 1  | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi    |        |            |              |       |       |             |             |             |     |
| 2  | Indeks Pelayanan Publik.                                 | Indeks | -          | 80,3         | 81,1  | 81,91 | 82,73       | 83,56       | 84,39       |     |
| 3  | Indeks Reformasi Hukum                                   | Indeks | -          | 87,83        | 88,71 | 89,59 | 90,49       | 91,4        | 92,31       |     |
| 4  | Nilai SAKIP Kabupaten                                    | Nilai  | B          | BB           | BB    | BB    | BB          | BB          | BB          |     |
| 5  | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)                          | Nilai  | Baik       | Baik         | Baik  | Baik  | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |     |
| 6  | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Nilai  | 3,35       | 3,38         | 3,4   | 3,43  | 3,46        | 3,5         | 3,53        |     |

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi**

| No | Indikator                                                                                                         | Status  | Satuan | Baseline   | Target Tahun |       |       |             |             |             | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
|    |                                                                                                                   |         |        | Tahun 2024 | 2025         | 2026  | 2027  | 2028        | 2029        | 2030        |      |
| 1. | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                                         |         |        |            |              |       |       |             |             |             |      |
| 2. | Indeks Pelayanan Publik.                                                                                          | positif | Indeks | -          | 80,3         | 81,1  | 81,91 | 82,73       | 83,56       | 84,39       |      |
| 3. | Nilai SAKIP Kabupaten                                                                                             | positif | Nilai  | B          | BB           | BB    | BB    | BB          | BB          | BB          |      |
| 4. | Indeks Reformasi Hukum                                                                                            | positif | Indeks | -          | 87,83        | 88,71 | 89,59 | 90,49       | 91,4        | 92,31       |      |
| 5. | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)                                                                                   | positif | Nilai  | Baik       | Baik         | Baik  | Baik  | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |      |
| 6. | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)                                                          | positif | Nilai  | 3,35       | 3,38         | 3,4   | 3,43  | 3,46        | 3,5         | 3,53        |      |
| 7. | Persentase peningkatan tata kelola di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa | positif | %      | 100        | 100          | 100   | 100   | 100         | 100         | 100         |      |
| 8. | Persentase peningkatan tata kelola di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum                    | positif | %      | 100        | 100          | 100   | 100   | 100         | 100         | 100         |      |



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi**

| Ke- (Rp.)                                                   |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program                                                     | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1                                                           | 2              | 3              | 4              | 5              |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               | 5.592.173.460  | 19.546.020.034 | 18.347.594.676 | 18.904.257.987 |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | 158.315.800    | 627.866.806    | 487.641.090    | 803.819.060    |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 31.148.372.302 | 27.040.247.631 | 28.640.595.142 | 35.727.874.719 |

| Persentase Realisasi Anggaran (%)                           |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Program                                                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1                                                           | 2      | 3      | 4      | 5      |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               | 79,84% | 89,83% | 95,29% | 92%    |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | 95,08% | 98,87% | 97,21% | 96,43% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 97,24% | 95,83% | 99,05% | 90,39% |



## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah.

### **1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kelompok sasaran utama Sekretariat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah. Layanan yang diberikan mencakup:

- Dukungan administrasi perkantoran;
- Tata usaha dan jadwal kegiatan pimpinan;
- Pelayanan rumah tangga dan kendaraan dinas;
- Fasilitasi kegiatan keprotokolan dan komunikasi publik.

### **2. Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD)**

Sekretariat Daerah memberikan layanan koordinasi, fasilitasi, dan dukungan kebijakan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi. Pelayanan mencakup:

- Fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- Dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
- Koordinasi lintas sektor;
- Pelayanan administrasi kepegawaian dan hukum.

### **3. DPRD Kabupaten Sigi sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah juga menjadi penghubung dan penyedia layanan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terutama terkait:**



- Koordinasi penyampaian dokumen perencanaan dan keuangan daerah;
  - Dukungan protokoler dalam kegiatan resmi daerah;
  - Fasilitasi komunikasi antara eksekutif dan legislatif;
4. Instansi Vertikal dan Pemerintah Atas (Provinsi/Pusat) Sekretariat Daerah memfasilitasi hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabuapten Sigi dengan:
- Instansi vertikal di tingkat kabupaten;
  - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Kementerian/Lembaga di tingkat pusat Layanan meliputi penyampaian data, fasilitasi kebijakan pusat, penyusunan laporan, dan penyesuaian regulasi.
5. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya (Tidak Langsung) Meskipun tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, Sekretariat Daerah berkontribusi terhadap pelayanan publik melalui:
- Penguatan sistem manajemen pemerintahan;
  - Dukungan komunikasi publik dan pelayanan informasi;
  - Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah;
  - Pelayanan pengaduan masyarakat (melalui koordinasi dengan perangkat teknis).

## **2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan dan isu strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting saat ini dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis adalah hal-hal pokok,



mendesak, berdampak besar, dan perlu segera ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, yang ditandai dengan belum terpadu dan efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi lintas sektor serta kurangnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan administrasi dan kepegawaian;
3. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal sistem pelaporan, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya berbasis hasil dan akuntabilitas publik;
4. Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan batas eksisting wilayah, baik antar Desa, kecamatan, maupun dengan kabupaten/kota lain, yang berdampak pada ketidakpastian perencanaan pembangunan wilayah;
5. Belum optimalnya kerjasama daerah, baik dalam bentuk kemitraan antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga,



sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

6. Belum terinventarisir secara optimal potensi risiko sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, sehingga belum terdapat sistem mitigasi risiko yang efektif untuk mencegah konflik horizontal dan isu-isu intoleransi;
7. Belum optimalnya perumusan kebijakan di bidang budaya, pendidikan, dan kesehatan, yang memerlukan fasilitasi lintas sektor dan sinergi antar Perangkat Daerah yang lebih terarah;
8. Belum optimalnya ketersediaan data terkait rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan ormas, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan sosial keagamaan;
9. Belum optimalnya proses inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang masih terkendala oleh ketidakterpaduan data dan minimnya koordinasi antar pihak terkait;
10. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum dan tenaga teknis publikasi hukum, serta belum optimalnya kebijakan bantuan hukum dan perlindungan HAM, baik bagi masyarakat umum maupun ASN dan pihak swasta yang berkaitan dengan iklim investasi;
11. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan hukum pemerintah;
12. Belum optimalnya penataan perekonomian daerah, yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) analis



ekonomi dan lemahnya koordinasi serta pelaporan kegiatan ekonomi lintas Perangkat Daerah;

13. Penyusunan program pembangunan dan pengendalian masih belum sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis dan menghadapi kendala penganggaran, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan Pembangunan;
14. Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku pengadaan, dinamika regulasi, serta minimnya sarana, prasarana, dan personil UKPBJ yang professional;
15. Kurangnya minat ASN untuk menjadi JF PPBJ akibat beban kerja yang berat dan risiko hukum yang tinggi, serta sulitnya memenuhi persyaratan kompetensi untuk jabatan tersebut;
16. Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasarana aparatur serta pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi dan masih digunakannya metode manual yang tidak efisien;
17. Belum terintegrasinya data kepegawaian secara digital, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas SDM dalam mengelola administrasi modern;
18. Belum optimalnya kebijakan teknis terkait analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi, termasuk penilaian zona integritas, AKIP, dan SAKIP OPD yang masih rendah, serta keterbatasan SDM bidang organisasi dan kinerja;
19. Belum optimalnya pengelolaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, serta kurangnya efektivitas



penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah, yang menghambat fungsi keprotokolan dan komunikasi publik;

20. Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan, serta masih lemahnya inventarisasi aset dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, yang disebabkan oleh keterbatasan dokumen dan informasi aset.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut: Berdasarkan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Permasalahan utama terletak pada lemahnya kapasitas koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah, yang menghambat optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kualitas pelayanan aparatur, baik dari segi kompetensi, kedisiplinan, maupun pengelolaan administrasi dan kepegawaian, masih belum memadai. Di sisi lain, sistem pelaporan, evaluasi, dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil dan belum didukung dengan data yang akurat serta teknologi informasi yang terintegrasi. Persoalan lain yang turut memperburuk efektivitas tata kelola adalah belum tertatanya data wilayah dan batas administrasi, terbatasnya kerjasama antardaerah maupun dengan



pihak ketiga, serta belum optimalnya mitigasi risiko sosial dan fasilitasi keagamaan. Di bidang pelayanan hukum dan HAM, masih terdapat kekurangan tenaga profesional serta lemahnya monitoring terhadap produk hukum daerah.

Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan serta pengadaan barang/jasa masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman regulasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya tenaga teknis profesional, khususnya pada UKPBJ dan jabatan fungsional pengadaan. Aspek kelembagaan, reformasi birokrasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan juga menunjukkan kelemahan yang memerlukan perhatian khusus.

Kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan, inventarisasi aset, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan menunjukkan masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya kapasitas SDM di berbagai bidang strategis pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi SDM, mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola manajerial dan koordinatif, guna mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **b. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menuntut perhatian, kebijakan, dan tindakan strategis dalam jangka menengah hingga panjang. Isu strategis muncul sebagai hasil dari identifikasi faktor internal dan eksternal,



termasuk dinamika lingkungan, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, serta kemampuan dan sumber daya organisasi.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### 1. Isu Strategis Internal Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tantangan tersebut antara lain:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, taat asas, kolaboratif, dan berintegritas, serta masih terbatasnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance;
- b. Kualitas pelayanan publik yang belum merata dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu peningkatan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.
- c. Masih rendahnya efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdampak pada optimalisasi anggaran dan akuntabilitas keuangan daerah.
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kapasitas ASN, khususnya dalam penerapan teknologi informasi dan sistem administrasi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern.



- e. Rendahnya kinerja kelembagaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, aset daerah (BMD), dan perencanaan program yang berbasis elektronik, yang harus diperkuat untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- f. Pengelolaan bantuan hibah di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang masih memerlukan optimalisasi agar tepat sasaran dan akuntabel.
- g. Keterbatasan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang adaptif dan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penyelesaian permasalahan hukum daerah yang belum maksimal.
- h. Belum optimalnya peran keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang strategis.

## 2. Isu Strategis Nasional

Secara nasional, terdapat berbagai isu struktural yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di antaranya:

- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
- b. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik.



- c. Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat.
- d. Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah (BMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
- e. Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
- f. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah.
- g. Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian.

### 3. Isu Strategis Regional

Lingkungan regional menghadirkan tantangan tersendiri yang memerlukan kolaborasi antar daerah dan penyesuaian kebijakan yang sinergis, yaitu:

- a. Rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsif.



- b. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah, termasuk rendahnya capaian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas pelayanan publik di tingkat regional.
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi daerah.
- d. Terbatasnya basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai penggerak utama dinamika perekonomian regional.
- e. Minimnya infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi.
- f. Belum terbangunnya kolaborasi efektif antar daerah dalam menerapkan kebijakan lingkungan dan pengadaan hijau yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah adalah pernyataan yang menggambarkan permasalahan utama, tantangan, atau hal-hal penting yang harus segera diatasi atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Isu strategis disusun berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi aktual yang mencakup aspek internal dan eksternal, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Isu strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat prioritas, dan menjadi pijakan dalam menentukan arah pencapaian visi dan misi kepala daerah.



**Tabel 2.8**  
**Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                           | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                        |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                                                                                                                        | NASIONAL                                                                                                              | REGIONAL                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                         | 2                                                                                                                      | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>                                | belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah                                                 |                                              | belum optimalnya kualitas layanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang efektif, efisien dan berjangkau | belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik | belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik | Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
|                                                           | Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintahan daerah |                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah                                            |                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                          | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH          |                                                                                              |                                                                                    | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                  | NASIONAL                                                                                     | REGIONAL                                                                           |                                                                                                                                    |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                            | 4                                                                      | 5                                                                                            | 6                                                                                  | 7                                                                                                                                  |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar Desa, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain. |                                              |                                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                           | Belum optimalnya kerjasama daerah                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                           | Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan                                                                                           |                                              | Tuntutan peningkatan kualitas Pembinaan dan pelayanan Bidang Keagamaan | Belum Optimalnya pembinaan, inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan bidang keagamaan | Adanya Pembinaan, inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan bidang keagamaan | optimalisasi Pembinaan, inventarisasi, verifikasi, monev dan pemberian hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat |
|                                                           | Belum optimal nya rumusan kebijakan bidang budaya, pendidikan dan kesehatan                                                                                                                                           |                                              |                                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                           | Belum optimal nya ketersediaan data terkait keberadaan rumah ibadah, organisasi, lembaga dan ormas keagamaan                                                                                                          |                                              |                                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                           | Belum optimal nya inventarisasi, verifikasi dan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan                                                                                                       |                                              |                                                                        |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                    |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                          | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                                                                             | NASIONAL                                                                                       | REGIONAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                            | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                              | 6                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                       |
| BAGIAN HUKUM                                              | Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum                                                                                                               |                                              | rendahnya kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga harus dilakukan reformasi hukum dan pencegahan serta pemberantasan korupsi | Tumpang Tindih aturan Pusat dan Daerah                                                         | belum optimalnya kualitas/kuantitas produk hukum yang dihasilkan                                                               | Optimalisasi produk hukum yang dihasilkan, penyelesaian perkara hukum dan permasalahan hukum serta analisis dan evaluasi produk hukum daerah            |
|                                                           | Belum optimal nya kebijakan bantuan dan keberpihakan hukum dan HAM bagi masyarakat, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dan atau bagi pihak swasta yang mendorong daya saing investasi daerah |                                              | rendahnya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi dan rendahnya kebijakan terhadap HAM                                                      | Tumpang Tindih aturan Pusat dan Daerah                                                         | Belum optimalnya penanganan perkara Non Litigasi                                                                               |                                                                                                                                                         |
|                                                           | Masih belum optimal nya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah                                                                                                                                   |                                              | rendahnya produk hukum yang menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi                                                                          | Tumpang Tindih aturan Pusat dan Daerah                                                         | Belum optimalnya analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi |                                                                                                                                                         |
| BAGIAN EKON DAN SDA                                       | Masih belum optimal nya penataan dan permasalahan perekonomian;                                                                                                                                       |                                              | pemerataan perekonomian                                                                                                                           | investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian | belum tumbuhnya basis ekonomi daerah yang mampu menjadi daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah              | Pengembangan kegiatan investasi dengan memanfaatkan potensi sektor unggulan dan produk unggulan daerah dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                    | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ISU STRATEGIS DAERAH PD |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                                           |                                                                                                 |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGIONAL |                         |
| 1                                                         | 2                                                                                               | 3                                            | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        | 7                       |
|                                                           |                                                                                                 |                                              | belum terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan                                          | pembentukan/ penataan kelembagaan yang bertugas mengelola investasi, mengelola BUMD yang merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu sehingga tata kelola investasi menjadi lebih transparan dan akuntabel dan akan mendorong aset - aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal |          |                         |
|                                                           | Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan dibidang perekonomian pada perangkat daerah terkait |                                              | belum tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                         |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                    | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                                                                                                                                                                                           | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                         | REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                    | Penyusunan program pembangunan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan yang kurang mempedomani petunjuk teknis dan keterbatasan dalam penganggaran                                                           | pembangunan yang memperhatikan Dampak dari<br>1. perubahan iklim seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan risiko bencana alam,<br>2. Pencemaran: Pencemaran udara, air, dan tanah oleh bahan kimia, limbah, dan polusi lainnya.<br>3. Penggunaan Sumber Daya Alam: Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan air, hutan, dan mineral. | Tuntutan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan | kemudahan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik. dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan | optimalisasi penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan | penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi |
| <b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>                   | Belum optimal nya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang disebabkan Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan layanan                                                                                                                                                                                              | adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data terintegrasi                                                                                                                                                                                                   | adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data terintegrasi                                                                                                                                                                                                      | optimalisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah                                                                                                                                                                                                                      |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                                                         | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH |          |          | ISU STRATEGIS DAERAH PD |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                      |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                         | NASIONAL | REGIONAL |                         |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                    | 3                                            | 4                                                             | 5        | 6        | 7                       |
|                                                           | Regulasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersifat dinamis, yang memerlukan pelaku pengadaan yang bisa menyesuaikan dengan regulasi dimaksud |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           | Masih belum optimal nya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa                                                                                  |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           | Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan                                                                    |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           | Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa                               |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           | Belum optimal nya personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan                                                           |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           | Sulitnya persyaratan kompetensi untuk lulus menjadi JF PPBJ                                                                                          |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           | Kurang tertariknya ASN untuk menjadi JF PPBJ karena besarnya risiko hukum dan beban pekerjaan yang berat.                                            |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                                                               |          |          |                         |
|                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                                                               |          |          |                         |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                               | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                            |          |          | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                            |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                    | NASIONAL | REGIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                         | 2                                                                                                          | 3                                            | 4                                                                                        | 5        | 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BAGIAN UMUM                                               | Belum optimal nya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian |                                              | Tuntutan pelayanan publik berbasis digital dan efisiensi tata kelola ASN secara nasional |          |          | Optimalisasi fasilitasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kualitas dan efektivitas layanan administrasi kepegawaian, penguatan sistem informasi kepegawaian dan digitalisasi arsip, peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan administrasi berbasis digital, serta penguatan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berintegritas. |
|                                                           | Belum optimal nya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor                                                 |                                              | Transformasi digital ASN dan sistem pelayanan publik secara nasional                     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian                                                |                                              | Globalisasi kompetensi ASN dan adaptasi teknologi                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | Ketidakterpaduan data kepegawaian dan dokumen kepegawaian secara digital                                   |                                              | Kebutuhan global akan tatakelola administrasi yang informatif, komunikatif dan akuntabel |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | Rendahnya kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi                                              |                                              |                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | Masih ditemukan praktik administrasi manual yang lambat dan tidak efisien                                  |                                              |                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                 | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                          | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                              |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                                                                                                                                                                                                                   | NASIONAL | REGIONAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                         | 2                                                                                                            | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        | 6                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                               |
| BAGIAN ORGANISASI                                         | Belum optimal nya kebijakan teknis terkait analisis jabatan                                                  |                                              | Transformasi tata kelola memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi untuk mencegah dan menanggulangi tindakan tindak yang merugikan masyarakat langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang |          | belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan              | peningkatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan penilaian SAKIP OPD dan pelayanan publik |
|                                                           | Belum optimal nya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan publik pada unit pelayanan publik (UPP) Ombudsman |                                              | Kualitas layanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang efektif, efisien dan berjangkau                                                                                                             |          | masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | Masih belum optimal nya penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan perangkat Daerah                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | masih rendahnya penilaian SAKIP OPD dan pelayanan publik                                 |                                                                                                                                                                                                 |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                       | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH |                                            |                                                                       | ISU STRATEGIS DAERAH PD                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                    |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                         | NASIONAL                                   | REGIONAL                                                              |                                                                   |
| 1                                                         | 2                                                                                                                  | 3                                            | 4                                                             | 5                                          | 6                                                                     | 7                                                                 |
|                                                           | Masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, dan pelayanan publik |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |
|                                                           | Jumlah dan kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Organisasi,                                                        |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |
|                                                           | ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai                                                        |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |
|                                                           | Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik                                         |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |
|                                                           | Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan                                        |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |
| BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                   | Belum optimal nya kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               |                                              | Tuntutan keprotokolan, komunikasi pimpinan                    | Tuntutan keprotokolan, komunikasi pimpinan | belum optimalnya penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan | optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan |
|                                                           | Belum optimal nya kebijakan penyampaian informasi dan publikasi kegiatan KDH dan WKDH                              |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |
|                                                           | Belum optimumnya kebijakan pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu                                             |                                              |                                                               |                                            |                                                                       |                                                                   |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                            | ISU KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH                                    |                                                    |          | ISU STRATEGIS DAERAH PD                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              | GLOBAL (sumber RPJMN)                                                                            | NASIONAL                                           | REGIONAL |                                                    |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                            | 4                                                                                                | 5                                                  | 6        | 7                                                  |
|                                                           | Belum optimumnya kebijakan pengaturan jadwal kegiatan Perangkat Daerah yang melibat kan KDH dan WKDH                                                                                    |                                              |                                                                                                  |                                                    |          |                                                    |
| BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                           | Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah                                                                                             |                                              | tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMD lebih efisien efekti, akuntabel dan transparan | Peningkatkan perencanaan dan administrasi keuangan |          | Peningkatkan perencanaan dan administrasi keuangan |
|                                                           | Belum optimalnya inventarisasi aset dan tindaklanjut atas temuan sekretariat daerah, karena keterbatasan informasi atas dokumen dan keberadaan aset                                     |                                              |                                                                                                  |                                                    |          |                                                    |
|                                                           | Belum Maksimalnya koordinasi antar bagian sekretariat dalam keterlibatan proses perencanaan karena keterbatasan waktu koordinasi karena kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing bagian |                                              |                                                                                                  |                                                    |          |                                                    |



### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029**

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi. Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Sekretariat Daerah Kab. Sigi Tahun 2025-2029

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                        | TUJUAN                                                         | SASARAN                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                             | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |             |             |             | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                  |                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                       |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028        | 2029        | 2030        |            |
| (01)                                                             | (02)                                                           | (03)                                                                                                   | (04)                                                                                                                  | (05)             | -6           | (07)  | (08)  | (09)        | (10)        | (11)        | (12)       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi            |                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                       |                  |              |       |       |             |             |             |            |
| - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien |                                                                                                        | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)                                                                                     | -                | 80,3         | 81,1  | 81,91 | 82,73       | 83,56       | 84,39       |            |
|                                                                  |                                                                |                                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum (Indeks)                                                                                       | -                | 87,83        | 88,71 | 89,59 | 90,49       | 91,4        | 92,31       |            |
|                                                                  |                                                                |                                                                                                        | Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)                                                                                         | B                | BB           | BB    | BB    | BB          | BB          | BB          |            |
|                                                                  |                                                                |                                                                                                        | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Nilai)                                                                               | Baik             | Baik         | Baik  | Baik  | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |            |
|                                                                  |                                                                |                                                                                                        | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Nilai)                                                      | 3,35             | 3,38         | 3,4   | 3,43  | 3,46        | 3,5         | 3,53        |            |
|                                                                  |                                                                | Meningkatnya tata kelola dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum                    | Persentase peningkatan tata kelola di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum (%)                    | 100              | 100          | 100   | 100   | 100         | 100         | 100         |            |
|                                                                  |                                                                | Meningkatnya tata kelola dibidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa | Persentase peningkatan tata kelola di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa (%) | 100              | 100          | 100   | 100   | 100         | 100         | 100         |            |
|                                                                  |                                                                | Meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan                                                  | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                   | B                | BB           | BB    | BB    | BB          | A           | A           |            |



### **3.2 STRATEGI RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029**

Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan operasional yang disusun secara sistematis untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini menjadi kerangka acuan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi per bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi sebagai berikut:

#### **1. Bagian Pemerintahan**

Strategi:

- a. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Menyusun dan memutakhirkan data kewilayahan serta fasilitasi penyelesaian batas wilayah;
- c. Mengoptimalkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri.

#### **2. Bagian Hukum**

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
- b. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

#### **3. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Strategi:

- a. Meningkatkan koordinasi program sosial dan keagamaan lintas sektor;
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan;
- c. Mengembangkan sistem monitoring evaluasi program kesejahteraan secara partisipatif.

#### **4. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)**

Strategi:

- a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah;



- b. Memfasilitasi pengembangan investasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
  - c. Mengembangkan sistem data dan informasi ekonomi daerah yang terintegrasi.
5. Bagian Administrasi Pembangunan
- Strategi:
- a. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program pembangunan;
  - b. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan pembangunan;
  - c. Meningkatkan sinergi program antar SKPD melalui fasilitasi pengendalian program.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Strategi:
- a. Mendorong pelaksanaan pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel;
  - b. Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
  - c. Mengembangkan sistem informasi pengadaan secara digital dan real-time.
7. Bagian Umum
- Strategi:
- a. Meningkatkan efisiensi layanan administrasi perkantoran dan logistik kepala daerah;
  - b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana kantor yang representatif;
  - c. Meningkatkan pengelolaan aset dan pemeliharaan fasilitas kerja.
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dan disiplin pegawai
8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Strategi:
- a. Meningkatkan profesionalisme layanan keprotokolan;
  - b. Meningkatkan kualitas publikasi dan informasi kegiatan kepala daerah;
  - c. Mengembangkan kanal komunikasi publik yang inklusif dan berbasis digital.
9. Bagian Organisasi
- Strategi:



- a. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata laksana kelembagaan;
- b. Mendorong evaluasi kelembagaan berbasis kinerja dan kebutuhan daerah;
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan inovasi birokrasi.

**10. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Strategi:**

- a. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- b. Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. Memperkuat sistem pelaporan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel.

| <b>TAHAP I<br/>(2026)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TAHAP II<br/>(2027)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TAHAP III<br/>(2028)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TAHAP IV<br/>(2029)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TAHAP V<br/>(2030)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penyusunan Infrastruktur dan Kebijakan SPBE Fokus pada penyusunan kebijakan dan infrastruktur dasar untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pemetaan kebutuhan digitalisasi layanan pemerintahan. Melakukan pelatihan awal untuk ASN terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik. | Penyusunan Infrastruktur dan Kebijakan SPBE Fokus pada penyusunan kebijakan dan infrastruktur dasar untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pemetaan kebutuhan digitalisasi layanan pemerintahan. Melakukan pelatihan awal untuk ASN terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik | Implementasi SPBE dan Penguatan Layanan Digital Mengimplementasikan sistem SPBE di beberapa layanan pemerintahan utama, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pengelolaan anggaran. Menyediakan pelatihan lebih lanjut untuk ASN dalam penggunaan platform digital dan memastikan aksesibilitas layanan publik berbasis teknologi. | Peningkatan Transparansi dan Efisiensi Anggaran Memperkuat transparansi anggaran dengan mengintegrasikan data anggaran daerah ke dalam sistem digital yang dapat diakses publik. Mengoptimalkan sistem untuk mempercepat proses pengajuan dan pelaporan anggaran, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. | Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Digital Melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE dan transparansi anggaran untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu perbaikan. Menyempurnakan sistem berdasarkan feedback dari masyarakat dan ASN, serta mengembangkan fitur baru untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pemerintahan lebih lanjut. |



### **3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029**

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah merupakan rumusan umum mengenai pendekatan dan prioritas kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif, serta menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabuapten Sigi Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabuapten Sigi ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat;
3. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, memperkuat penyelesaian permasalahan hukum melalui pendampingan dan bantuan hukum, serta mengoptimalkan analisis dan evaluasi regulasi untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan daerah;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah, sambil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan penguatan sektor ekonomi local;



5. Menyusun program kerja berbasis elektronik sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan dampak lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi;
6. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement), peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta penguatan pengawasan dan evaluasi proses pengadaan;
7. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi aparatur secara profesional dan berbasis digital melalui penguatan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, digitalisasi arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas;
8. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kWelebagaan, mendorong budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penilaian pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja organisasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat;
9. Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan secara profesional, responsif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas koordinasi pimpinan daerah serta memperkuat diseminasi informasi kebijakan pemerintah secara tepat dan strategis;
10. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta penataan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi dan peningkatan kapasitas SDM. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi 2025-2029 yaitu upaya pemberdayaan masyarakat difokuskan pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan, akses pendidikan, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial. Pengembangan infrastruktur sosial yang inklusif, meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan,



serta transportasi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, menjadi bagian integral dari strategi ini. Implementasi program Sigi Masagena, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan, akan memperkuat dampak positif dari program-program lainnya. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.



**Tabel.3.3 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

| NO. | OPERASIONAL NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berbasis reformasi birokrasi dan teknologi informasi melalui penerapan standar pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), standar kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi manajemen pemerintahan, serta prosedur pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif dan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi, penerapan good governance dan sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.                                                                                              |
| 2.  | Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial-keagamaan yang transparan dan akuntabel melalui sistem pendataan, verifikasi, dan penilaian kebutuhan masyarakat yang berbasis teknologi informasi, didukung oleh standar kriteria penerima, prosedur administrasi yang baku, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi                                                                               | Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat                                   | Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan di bidang keagamaan dan sosial masyarakat melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dan teknologi, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat |

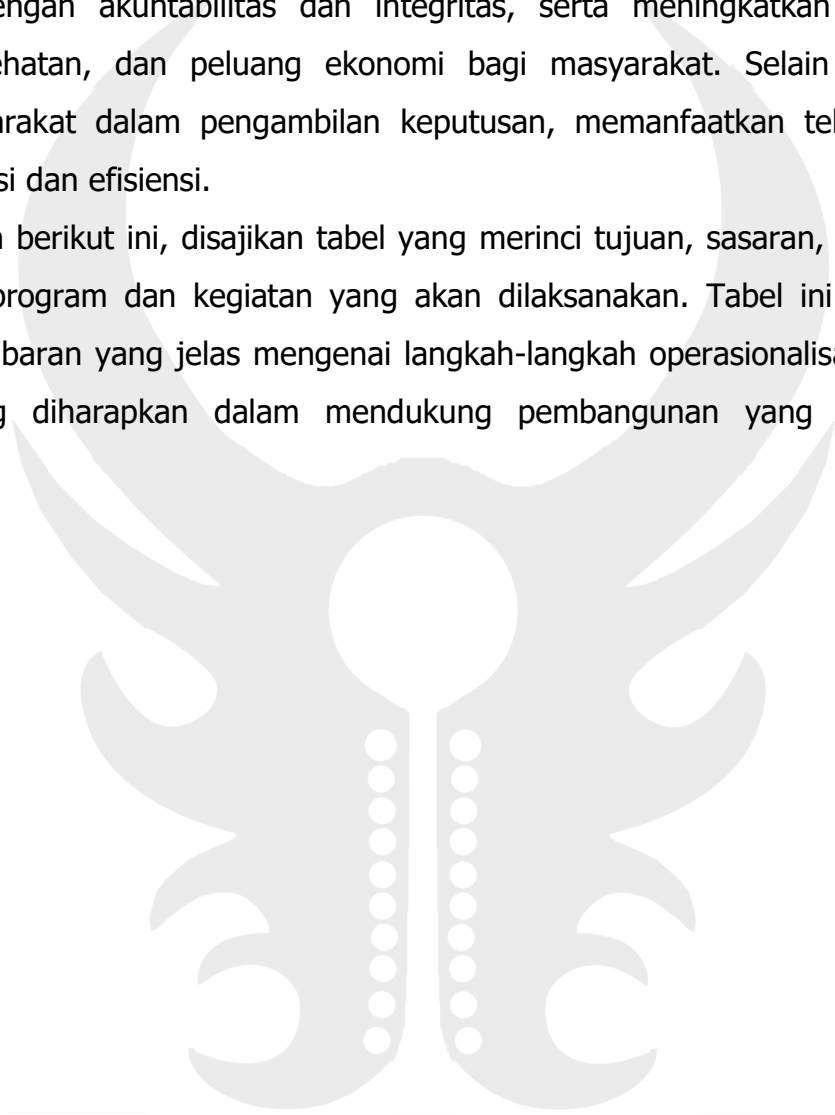


**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi  
Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tatakelola pemerintahan melalui penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan transparan, memperkuat lembaga pemerintahan dengan akuntabilitas dan integritas, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



Tabel. 4.1 Program dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                        | INDIKATOR OUTCOME                                                                                | BASELINE<br>2024 | 202<br>5 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                  |                  |          | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                            |
|                                                                             |                                                                                                  |                  |          | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                            |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                             | (03)             | (04)     | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                       |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                   |                                                                                                  |                  |          |                                 | 50.749.976.000,00 |        | 51.764.975.521,00 |        | 52.800.275.032,00 |        | 53.856.280.531,00 |        | 54.633.406.141,00 |                                                            |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                  |                  |          |                                 | 27.990.986.484,00 |        | 28.550.806.214,00 |        | 29.121.822.338,00 |        | 29.704.258.785,00 |        | 29.998.343.960,00 |                                                            |
| Meningkatnya kelancaran<br>administrasi kesekretariatan                     | Persentase kelancaran<br>administrasi program, keuangan,<br>umum dan kepegawaian (%)             | 100              | 100      | 100                             | 27.990.986.484,00 | 100    | 28.550.806.214,00 | 100    | 29.121.822.338,00 | 100    | 29.704.258.785,00 | 100    | 29.998.343.960,00 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM<br>PEMERINTAHAN DAN<br>KESEJAHTERAAN RAKYAT               |                                                                                                  |                  |          |                                 | 22.166.877.941,00 |        | 22.610.215.500,00 |        | 23.062.419.810,00 |        | 23.523.668.206,00 |        | 23.994.141.570,00 |                                                            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Kesejahteraan                            | Efektivitas Pelaksanaan<br>Kebijakan Kesejahteraan Rakyat<br>(Persentase)                        | -                | 70       | 75                              | 16.368.493.218,00 | 80     | 16.467.263.447,00 | 85     | 16.568.060.231,00 | 90     | 16.670.873.004,00 | 95     | 16.775.742.031,00 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Pemerintahan                             | Kinerja Penyelenggaraan<br>Pemerintahan (Persentase)                                             | -                | 70       | 75                              | 4.926.586.308,00  | 80     | 5.123.386.308,00  | 85     | 5.324.190.508,00  | 90     | 5.529.010.864,00  | 95     | 5.737.927.624,00  | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Produk Hukum                             | Persentase Produk Hukum yang<br>Dihasilkan (Persentase)                                          | -                | 70       | 75                              | 871.798.415,00    | 80     | 1.019.565.745,00  | 85     | 1.170.169.071,00  | 90     | 1.323.784.338,00  | 95     | 1.480.471.915,00  | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 - PROGRAM<br>PEREKONOMIAN DAN<br>PEMBANGUNAN                        |                                                                                                  |                  |          |                                 | 592.111.575,00    |        | 603.953.807,00    |        | 616.032.884,00    |        | 628.353.540,00    |        | 640.920.611,00    |                                                            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Administrasi Pembangunan                 | Efektivitas Kebijakan<br>Administrasi Pembangunan<br>(Persentase)                                | -                | 70       | 75                              | 168.081.137,00    | 80     | 171.081.137,00    | 85     | 174.081.137,00    | 90     | 177.081.137,00    | 95     | 180.081.136,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Pelayanan Pengadaan Barang<br>dan Jasa   | Tingkat Kematangan UKPBJ<br>(Angka)                                                              | -                | 6        | 7                               | 300.143.530,00    | 8      | 302.985.762,00    | 9      | 306.064.839,00    | 9      | 309.385.496,00    | 9      | 312.952.567,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Perekonomian                             | Efektivitas Pelaksanaan<br>Kebijakan Pengelolaan<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan (Persentase) | -                | 70       | 75                              | 123.886.908,00    | 80     | 129.886.908,00    | 85     | 135.886.908,00    | 90     | 141.886.907,00    | 95     | 147.886.908,00    | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat Daerah |
| TOTAL KESELURUHAN                                                           |                                                                                                  |                  |          |                                 | 50.749.976.000,00 |        | 51.764.975.521,00 |        | 52.800.275.032,00 |        | 53.856.280.531,00 |        | 54.633.406.141,00 |                                                            |



**4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh, termasuk keberhasilan dalam meningkatkan akses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas. Fokus utama dari rencana ini adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur sosial yang inklusif, memperluas akses dan perlindungan sosial, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan stakeholder dalam rangka mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, perencanaan ini juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga seluruh program mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberi manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sigi.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 2025-2029, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.

**Tabel.4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                       | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                         | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGKAT<br>DAERAH                                          | KETERANG<br>AN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                                                              |                |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                               | TARGE<br>T                      | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               |                                                              |                |
| (01)                                                                                             | (02)                                                                                                                                                                                                  | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                                                         | (15)           |
| 4.01 - SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                               |                                 | 53.191.464.5<br>44 |            | 54.255.293.8<br>35 |            | 55.340.399.7<br>12 |            | 53.447.207.7<br>06 |            | 57.516.151.8<br>60 |                                                              |                |
| 4.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   |                                                                                                                                                                                                       |                               |                                 | 27.990.986.4<br>84 |            | 28.550.806.2<br>14 |            | 29.121.822.3<br>38 |            | 26.704.258.7<br>85 |            | 30.238.343.9<br>61 |                                                              |                |
| Meningkatnya kelancaran<br>administrasi kesekretariatan                                          | Persentase kelancaran<br>administrasi program,<br>keuangan, umum dan<br>kepegawaian (%)                                                                                                               | 100                           | 100                             | 27.990.986.4<br>84 | 100        | 28.550.806.2<br>14 | 100        | 29.121.822.3<br>38 | 100        | 26.704.258.7<br>85 | 100        | 30.238.343.9<br>61 | 4.01.0.00.0.00.01.0<br>000 - Sekretariat<br>Daerah Kab. Sigi |                |
| 4.01.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah      |                                                                                                                                                                                                       |                               |                                 | 215.927.927        |            | 300.429.037        |            | 386.620.156        |            | 143.439.205        |            | 555.151.754        |                                                              |                |
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                                                                                               | -                             | 1                               | 215.927.927        | 1          | 300.429.037        | 1          | 386.620.156        | 1          | 143.439.205        | 1          | 555.151.754        |                                                              |                |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD (Laporan) | -                             | 1                               |                    | 1          |                    | 1          |                    | 1          |                    | 1          |                    |                                                              |                |
|                                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                      | -                             | 4                               |                    | 4          |                    | 4          |                    | 4          |                    | 4          |                    |                                                              |                |
|                                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Dokumen)                                                                                                                                           | -                             | 3                               |                    | 3          |                    | 3          |                    | 3          |                    | 3          |                    |                                                              |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                 | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |            |            |            |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|--|------------|
|                                                                            |                                                                                                                               |                               | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            | 2030       |            |                     |                |  |            |
|                                                                            |                                                                                                                               |                               | TARGE<br>T                      | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       |                     |                |  |            |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                                          | (03)                          | (04)                            | (05)       | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       | (14)                | (15)           |  |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Urusan Selain<br>Renstra PD dan                                                                 | -                             | 1                               |            | 1          |            | 1          |            | 1          |            | 1          |            |                     |                |  |            |
|                                                                            | Renja PD yang disusun<br>(Dokumen)                                                                                            |                               |                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                |  |            |
|                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>(Dokumen) | -                             | 1                               |            |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |                     |                |  | 1          |
|                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>(Dokumen) | -                             | 1                               |            |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |                     |                |  | 1          |
|                                                                            | Jumlah Data Statistik<br>Sektoral Daerah yang Telah<br>Dikumpulkan dan Diperiksa<br>Lingkup Perangkat Daerah<br>(Data)        | -                             | 1.200                           |            |            |            | 1.200      |            |            |            | 1.200      |            |                     |                |  | 1.200      |
|                                                                            | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD<br>(Dokumen)                       | -                             | 1                               |            |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |                     |                |  | 1          |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Walidata<br>Pendukung Statistik<br>Sektoral Daerah (Dokumen)                          | -                             | 1                               |            |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |                     |                |  | 1          |
|                                                                            | 4.01.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                  |                               |                                 |            |            |            | 35.343.972 |            |            |            | 45.406.630 |            |                     |                |  | 55.680.526 |
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Dokumen)                                                                   | -                             | 3                               | 35.343.972 | 3          | 45.406.630 | 3          | 55.680.526 | 3          | 23.488.400 | 3          | 75.747.009 |                     |                |  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                 | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |            |            |            |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                               |                               | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            | 2030       |            |                     |                |
|                                                                                                                       |                                                                                                                               |                               | TARGE<br>T                      | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       |                     |                |
| (01)                                                                                                                  | (02)                                                                                                                          | (03)                          | (04)                            | (05)       | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       | (14)                | (15)           |
| 4.01.01.2.01.0002 -<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  |                                                                                                                               |                               |                                 | 16.777.125 |            | 27.339.761 |            | 38.113.650 |            | 6.421.600  |            | 59.180.095 |                     |                |
| Tersedianya Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD<br>(Dokumen)                       | -                             | 1                               | 16.777.125 | 1          | 27.339.761 | 1          | 38.113.650 | 1          | 6.421.600  | 1          | 59.180.095 |                     |                |
| 4.01.01.2.01.0003 -<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                    |                                                                                                                               |                               |                                 | 13.277.125 |            | 23.839.761 |            | 34.613.650 |            | 2.921.600  |            | 55.680.095 |                     |                |
| Tersedianya Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>(Dokumen) | -                             | 1                               | 13.277.125 | 1          | 23.839.761 | 1          | 34.613.650 | 1          | 2.921.600  | 1          | 55.680.095 |                     |                |
| 4.01.01.2.01.0004 -<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                          |                                                                                                                               |                               |                                 | 16.704.625 |            | 27.267.261 |            | 38.041.150 |            | 6.349.100  |            | 59.107.595 |                     |                |
| Tersedianya Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD                       | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD<br>(Dokumen)                       | -                             | 1                               | 16.704.625 | 1          | 27.267.261 |            | 38.041.150 | 1          | 6.349.100  | 1          | 59.107.595 |                     |                |
| 4.01.01.2.01.0005 -<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                               |                                                                                                                               |                               |                                 | 15.154.625 |            | 25.717.261 |            | 36.491.150 |            | 4.799.100  |            | 57.557.595 |                     |                |
| Tersedianya Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>(Dokumen) | -                             | 1                               | 15.154.625 | 1          | 25.717.261 | 1          | 36.491.150 | 1          | 4.799.100  | 1          | 57.557.595 |                     |                |
| 4.01.01.2.01.0006 -<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                                                                                                               |                               |                                 | 21.227.605 |            | 31.790.241 |            | 42.564.130 |            | 10.872.080 |            | 63.630.575 |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | -                   | 1                               | 21.227.605 | 1      | 31.790.241 | 1      | 42.564.130 | 1      | 10.872.080 | 1      | 63.630.575  |                  |            |
| 4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 79.087.325 |        | 89.149.961 |        | 99.423.850 |        | 67.231.800 |        | 119.490.295 |                  |            |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | -                   | 4                               | 79.087.325 | 4      | 89.149.961 | 4      | 99.423.850 | 4      | 67.231.800 | 4      | 119.490.295 |                  |            |
| 4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 4.000.000  |        | 4.500.000  |        | 5.000.000  |        | 5.500.000  |        | 6.000.000   |                  |            |
| Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)                                                                                      | -                   | 1                               | 4.000.000  | 1      | 4.500.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.500.000  | 1      | 6.000.000   |                  |            |
| 4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 10.355.525 |        | 20.918.161 |        | 31.692.050 |        | 10.355.525 |        | 52.758.495  |                  |            |
| Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                    | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)                                                                       | -                   | 1.200                           | 10.355.525 | 1.200  | 20.918.161 | 1.200  | 31.692.050 | 1.200  | 10.355.525 | 1.200  | 52.758.495  |                  |            |
| 4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 4.000.000  |        | 4.500.000  |        | 5.000.000  |        | 5.500.000  |        | 6.000.000   |                  |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)                                                                                          | -                   | 1                               | 4.000.000  | 1      | 4.500.000  | 1      | 5.000.000  | 1      | 5.500.000  | 1      | 6.000.000   |                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |             |                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                      | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                     |                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                               | TARGE<br>T                      | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               | TARGE<br>T | PAGU               |                     |                |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                                                                                               | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                | (15)           |
| 4.01.01.2.02 - Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                |                                                                                                                                                                                    |                               |                                 | 11.941.672.7<br>14 |            | 12.005.048.5<br>30 |            | 12.069.691.8<br>64 |            | 11.879.539.5<br>64 |            | 12.196.090.5<br>34 |                     |                |
| Tersusunnya Dokumen<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                                                                           | -                             | 2                               | 11.941.672.7<br>14 | 2          | 12.005.048.5<br>30 | 2          | 12.069.691.8<br>64 | 2          | 11.879.539.5<br>64 | 2          | 12.196.090.5<br>34 |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut<br>Pemeriksaan (Dokumen)                                                                                        | -                             | 1                               |                    | 1          |                    | 1          |                    | 1          |                    | 1          |                    |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                             | -                             | 4                               |                    | 4          |                    | 4          |                    | 4          |                    | 4          |                    |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD (Laporan)                                        | -                             | 1                               |                    | 1          |                    | 1          |                    | 1          |                    | 1          |                    |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semest<br>eran SKPD (Laporan) | -                             | 24                              |                    | 24         |                    | 24         |                    | 24         |                    | 24         |                    |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                           | -                             | 106                             |                    | 106        |                    | 106        |                    | 106        |                    | 106        |                    |                     |                |
| 4.01.01.2.02.0001 -<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                |                                                                                                                                                                                    |                               |                                 | 11.285.668.4<br>89 |            | 11.296.231.1<br>25 |            | 11.307.005.0<br>14 |            | 11.275.312.9<br>64 |            | 11.328.071.4<br>59 |                     |                |
| Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                           | -                             | 106                             | 11.285.668.4<br>89 | 106        | 11.296.231.1<br>25 | 106        | 11.307.005.0<br>14 | 106        | 11.275.312.9<br>64 | 106        | 11.328.071.4<br>59 |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                    | (02)                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| 4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                                                                                                                              |                     |                                 | 600.208.525 |        | 610.771.161 |        | 621.545.050 |        | 589.853.000 |        | 642.611.495 |                  |            |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                | -                   | 4                               | 600.208.525 | 4      | 610.771.161 | 4      | 621.545.050 | 4      | 589.853.000 | 4      | 642.611.495 |                  |            |
| 4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           |                                                                                                                              |                     |                                 | 15.016.325  |        | 25.578.961  |        | 36.352.850  |        | 4.660.800   |        | 57.419.295  |                  |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)                                                           | -                   | 2                               | 15.016.325  | 2      | 25.578.961  | 2      | 36.352.850  | 2      | 4.660.800   | 2      | 57.419.295  |                  |            |
| 4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                         |                                                                                                                              |                     |                                 | 13.068.325  |        | 23.630.961  |        | 34.404.850  |        | 2.712.800   |        | 55.471.295  |                  |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | -                   | 1                               | 13.068.325  | 1      | 23.630.961  | 1      | 34.404.850  | 1      | 2.712.800   | 1      | 55.471.295  |                  |            |
| 4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                               |                                                                                                                              |                     |                                 | 13.855.525  |        | 24.418.161  |        | 35.192.050  |        | 3.500.000   |        | 56.258.495  |                  |            |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)                                           | -                   | 1                               | 13.855.525  | 1      | 24.418.161  | 1      | 35.192.050  | 1      | 3.500.000   | 1      | 56.258.495  |                  |            |
| 4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                     |                                                                                                                              |                     |                                 | 13.855.525  |        | 24.418.161  |        | 35.192.050  |        | 3.500.000   |        | 56.258.495  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |             |        |             |        |            |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                     | 2026                            |            | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |            | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)       | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | -                   | 24                              | 13.855.525 | 24     | 24.418.161  | 24     | 35.192.050  | 24     | 3.500.000  | 24     | 56.258.495  |                  |            |
| 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                 |                                                                                                                                                              |                     |                                 | 74.708.620 |        | 116.959.164 |        | 160.054.720 |        | 43.642.045 |        | 244.320.500 |                  |            |
| Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                            | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                  | -                   | 2                               | 74.708.620 | 2      | 116.959.164 | 2      | 160.054.720 | 2      | 43.642.045 | 2      | 244.320.500 |                  |            |
|                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                   | -                   | 2                               |            | 2      |             | 2      |             | 2      |            |        |             |                  |            |
|                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                         | -                   | 6                               |            | 6      |             | 6      |             | 6      |            |        |             |                  |            |
|                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                 | -                   | 1                               |            | 1      |             | 1      |             | 1      |            |        |             |                  |            |
| 4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                         |                                                                                                                                                              |                     |                                 | 15.196.445 |        | 25.759.081  |        | 36.532.970  |        | 4.840.920  |        | 57.599.415  |                  |            |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                  | -                   | 2                               | 15.196.445 | 2      | 25.759.081  | 2      | 36.532.970  | 2      | 4.840.920  | 2      | 57.599.415  |                  |            |
| 4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                               |                                                                                                                                                              |                     |                                 | 10.355.525 |        | 20.918.161  |        | 31.692.050  |        | 10.355.525 |        | 52.758.495  |                  |            |
| Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                 | -                   | 1                               | 10.355.525 | 1      | 20.918.161  | 1      | 31.692.050  | 1      | 10.355.525 | 1      | 52.758.495  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                 | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                            |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                       |                                                                                            |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                       | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                            |                     |                                 | 15.043.125    |        | 25.605.761    |        | 36.379.650    |        | 4.687.600     |        | 57.446.095    |                  |            |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | -                   | 2                               | 15.043.125    | 2      | 25.605.761    | 2      | 36.379.650    | 2      | 4.687.600     | 2      | 57.446.095    |                  |            |
| 4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |                                                                                            |                     |                                 | 34.113.525    |        | 44.676.161    |        | 55.450.050    |        | 23.758.000    |        | 76.516.495    |                  |            |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                       | -                   | 6                               | 34.113.525    | 6      | 44.676.161    | 6      | 55.450.050    | 6      | 23.758.000    | 6      | 76.516.495    |                  |            |
| 4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                                                                                            |                     |                                 | 133.905.525   |        | 144.468.161   |        | 155.242.050   |        | 123.550.000   |        | 176.308.495   |                  |            |
| Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                             | -                   | 4                               | 133.905.525   | 4      | 144.468.161   | 4      | 155.242.050   | 4      | 123.550.000   | 4      | 176.308.495   |                  |            |
| 4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |                                                                                            |                     |                                 | 133.905.525   |        | 144.468.161   |        | 155.242.050   |        | 123.550.000   |        | 176.308.495   |                  |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                             | -                   | 4                               | 133.905.525   | 4      | 144.468.161   | 4      | 155.242.050   | 4      | 123.550.000   | 4      | 176.308.495   |                  |            |
| 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                                                                                            |                     |                                 | 4.503.935.235 |        | 4.577.873.687 |        | 4.653.290.910 |        | 3.908.456.773 |        | 4.800.756.025 |                  |            |
| Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | -                   | 2                               | 4.503.935.235 | 2      | 4.577.873.687 | 2      | 4.653.290.910 | 2      | 3.908.456.773 | 2      | 4.800.756.025 |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | -                   | 2                               |               | 2      |               | 2      |               | 2      |               |        |               |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | -                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |        |               |                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                   | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |             |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                         |                                                                                                 |                               | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |             | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                         |                                                                                                 |                               | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| (01)                                                                                    | (02)                                                                                            | (03)                          | (04)                            | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)        | (12)       | (13)          | (14)                | (15)           |
|                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | -                             | 4                               |               | 4          |               | 4          |               | 4          |             | 4          |               |                     |                |
|                                                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | -                             | 1                               |               | 1          |               | 1          |               | 1          |             | 1          |               |                     |                |
|                                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                  | -                             | 1                               |               | 1          |               | 1          |               | 1          |             | 1          |               |                     |                |
|                                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                               | -                             | 9                               |               | 9          |               | 9          |               | 9          |             | 9          |               |                     |                |
|                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | -                             | 3                               |               | 3          |               | 3          |               | 3          |             | 3          |               |                     |                |
|                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | -                             | 4                               |               | 4          |               | 4          |               | 4          |             | 4          |               |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0001 -<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                 |                               |                                 | 32.732.225    |            | 43.294.861    |            | 54.068.750    |            | 22.376.700  |            | 75.135.195    |                     |                |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | -                             | 1                               | 32.732.225    | 1          | 43.294.861    | 1          | 54.068.750    | 1          | 22.376.700  | 1          | 75.135.195    |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0002 -<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                 |                               |                                 | 84.982.525    |            | 95.545.161    |            | 106.319.050   |            | 74.627.000  |            | 127.385.495   |                     |                |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | -                             | 2                               | 84.982.525    | 2          | 95.545.161    | 2          | 106.319.050   | 2          | 74.627.000  | 2          | 127.385.495   |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0003 -<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                 |                               |                                 | 1.001.878.379 |            | 1.012.441.015 |            | 1.023.214.904 |            | 991.522.854 |            | 1.044.281.349 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                          | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                        |                                                                                        |                               | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                     |                |
|                                                                                                        |                                                                                        |                               | TARGE<br>T                      | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                     |                |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                                                   | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                | (15)           |
| Tersedianya Peralatan<br>Rumah Tangga                                                                  | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                      | -                             | 4                               | 1.001.878.37<br>9 | 4          | 1.012.441.01<br>5 | 4          | 1.023.214.90<br>4 | 4          | 991.522.854       | 4          | 1.044.281.34<br>9 |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                             |                                                                                        |                               |                                 | 10.355.525        |            | 20.918.161        |            | 31.692.050        |            | 10.355.525        |            | 52.758.495        |                     |                |
| Tersedianya Bahan Logistik<br>Kantor                                                                   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                       | -                             | 4                               | 10.355.525        | 4          | 20.918.161        | 4          | 31.692.050        | 4          | 10.355.525        | 4          | 52.758.495        |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                    |                                                                                        |                               |                                 | 36.383.531        |            | 46.946.167        |            | 57.720.056        |            | 26.028.006        |            | 78.786.501        |                     |                |
| Tersedianya Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                                          | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan (Paket)              | -                             | 2                               | 36.383.531        | 2          | 46.946.167        | 2          | 57.720.056        | 2          | 26.028.006        | 2          | 78.786.501        |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0008 -<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                                                                                        |                               |                                 | 1.540.260.76<br>3 |            | 1.550.260.76<br>3 |            | 1.560.260.76<br>3 |            | 1.263.232.57<br>3 |            | 1.579.232.59<br>1 |                     |                |
| Terlaksananya Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu (Laporan)                                  | -                             | 9                               | 1.540.260.76<br>3 | 9          | 1.550.260.76<br>3 | 9          | 1.560.260.76<br>3 | 9          | 1.263.232.57<br>3 | 9          | 1.579.232.59<br>1 |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      |                                                                                        |                               |                                 | 1.786.986.76<br>3 |            | 1.796.986.76<br>3 |            | 1.806.986.76<br>3 |            | 1.509.958.59<br>1 |            | 1.825.958.59<br>1 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan) | -                             | 3                               | 1.786.986.76<br>3 | 3          | 1.796.986.76<br>3 | 3          | 1.806.986.76<br>3 | 3          | 1.509.958.59<br>1 | 3          | 1.825.958.59<br>1 |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0010 -<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                        |                                                                                        |                               |                                 | 5.177.762         |            | 5.740.398         |            | 6.514.287         |            | 5.177.762         |            | 8.608.904         |                     |                |
| Terlaksananya<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD<br>(Dokumen)                | -                             | 1                               | 5.177.762         | 1          | 5.740.398         | 1          | 6.514.287         | 1          | 5.177.762         | 1          | 8.608.904         |                     |                |
| 4.01.01.2.06.0011 -<br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD |                                                                                        |                               |                                 | 5.177.762         |            | 5.740.398         |            | 6.514.287         |            | 5.177.762         |            | 8.608.904         |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                 |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                       |                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                            | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | -                   | 1                               | 5.177.762     | 1      | 5.740.398     | 1      | 6.514.287     | 1      | 5.177.762     | 1      | 8.608.904     |                  |            |
| 4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                                                                                                 |                     |                                 | 3.075.162.200 |        | 3.138.538.016 |        | 3.203.181.350 |        | 3.044.095.625 |        | 3.329.580.020 |                  |            |
| Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                    | -                   | 2                               | 3.075.162.200 | 2      | 3.138.538.016 | 2      | 3.203.181.350 | 2      | 3.044.095.625 | 2      | 3.329.580.020 |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                       | -                   | 600                             |               | 600    |               | 600    |               | 600    |               | 600    |               |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                          | -                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)      | -                   | 3                               |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                  | -                   | 40                              |               | 40     |               | 40     |               | 40     |               | 40     |               |                  |            |
|                                                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)     | -                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
| 4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                 |                     |                                 | 1.689.585.525 |        | 1.700.148.161 |        | 1.710.922.050 |        | 1.679.230.000 |        | 1.731.988.495 |                  |            |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)      | -                   | 3                               | 1.689.585.525 | 3      | 1.700.148.161 | 3      | 1.710.922.050 | 3      | 1.679.230.000 | 3      | 1.731.988.495 |                  |            |
| 4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan                                               |                                                                                                 |                     |                                 | 10.355.525    |        | 20.918.161    |        | 31.692.050    |        | 10.355.525    |        | 52.758.495    |                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                        |                                                                                                  |                               | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                        |                                                                                                  |                               | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                             | (03)                          | (04)                            | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                | (15)           |
| Dinas Operasional atau Lapangan                                                        |                                                                                                  |                               |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                     |                |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | -                             | 2                               | 10.355.525    | 2          | 20.918.161    | 2          | 31.692.050    | 2          | 10.355.525    | 2          | 52.758.495    |                     |                |
| 4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                                  |                               |                                 | 977.264.575   |            | 987.827.211   |            | 998.601.100   |            | 966.909.050   |            | 1.019.667.545 |                     |                |
| Tersedianya Mebel                                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | -                             | 600                             | 977.264.575   | 600        | 987.827.211   | 600        | 998.601.100   | 600        | 966.909.050   | 600        | 1.019.667.545 |                     |                |
| 4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                  |                               |                                 | 377.245.525   |            | 387.808.161   |            | 398.582.050   |            | 366.890.000   |            | 419.648.495   |                     |                |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | -                             | 40                              | 377.245.525   | 40         | 387.808.161   | 40         | 398.582.050   | 40         | 366.890.000   | 40         | 419.648.495   |                     |                |
| 4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |                                                                                                  |                               |                                 | 10.355.525    |            | 20.918.161    |            | 31.692.050    |            | 10.355.525    |            | 52.758.495    |                     |                |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | -                             | 1                               | 10.355.525    | 1          | 20.918.161    | 1          | 31.692.050    | 1          | 10.355.525    | 1          | 52.758.495    |                     |                |
| 4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                               |                                 | 10.355.525    |            | 20.918.161    |            | 31.692.050    |            | 10.355.525    |            | 52.758.495    |                     |                |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | -                             | 1                               | 10.355.525    | 1          | 20.918.161    | 1          | 31.692.050    | 1          | 10.355.525    | 1          | 52.758.495    |                     |                |
| 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                                                                                                  |                               |                                 | 1.935.842.100 |            | 1.978.092.644 |            | 2.021.188.200 |            | 1.627.747.335 |            | 2.105.453.980 |                     |                |
| Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | -                             | 3                               | 1.935.842.100 | 3          | 1.978.092.644 | 3          | 2.021.188.200 | 3          | 1.627.747.335 | 3          | 2.105.453.980 |                     |                |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                                    | -                             | 12                              |               | 12         |               | 12         |               | 12         |               | 12         |               |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|--|---|
|                                                                             |                                                                                                  |                               | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |  |   |
|                                                                             |                                                                                                  |                               | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |  |   |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                             | (03)                          | (04)                            | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                | (15)           |  |   |
|                                                                             | Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                 |                               |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                     |                |  |   |
|                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 4                             | 4                               |               |            |               | 4          |               |            |               | 4          |               |                     |                |  | 4 |
|                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | -                             | 1                               |               |            |               | 1          |               |            |               | 1          |               |                     |                |  | 1 |
| 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |                                                                                                  |                               |                                 | 30.355.525    |            | 40.918.161    |            | 51.692.050    |            | 20.000.000    |            | 72.758.495    |                     |                |  |   |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | -                             | 1                               | 30.355.525    | 1          | 40.918.161    | 1          | 51.692.050    | 1          | 20.000.000    | 1          | 72.758.495    |                     |                |  |   |
|                                                                             |                                                                                                  |                               |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                     |                |  |   |
| 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                                                                                                  |                               |                                 | 533.555.525   |            | 544.118.161   |            | 554.892.050   |            | 523.200.000   |            | 575.958.495   |                     |                |  |   |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | -                             | 3                               | 533.555.525   | 3          | 544.118.161   | 3          | 554.892.050   | 3          | 523.200.000   | 3          | 575.958.495   |                     |                |  |   |
| 4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       |                                                                                                  |                               |                                 | 30.355.525    |            | 40.918.161    |            | 51.692.050    |            | 20.000.000    |            | 72.758.495    |                     |                |  |   |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 4                             | 4                               | 30.355.525    | 4          | 40.918.161    | 4          | 51.692.050    | 4          | 20.000.000    | 4          | 72.758.495    |                     |                |  |   |
| 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |                                                                                                  |                               |                                 | 1.341.575.525 |            | 1.352.138.161 |            | 1.362.912.050 |            | 1.064.547.335 |            | 1.383.978.495 |                     |                |  |   |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | -                             | 12                              | 1.341.575.525 | 12         | 1.352.138.161 | 12         | 1.362.912.050 | 12         | 1.064.547.335 | 12         | 1.383.978.495 |                     |                |  |   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                             | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                               | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                     |                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                               | TARGE<br>T                      | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                     |                |
| (01)                                                                                                                                                      | (02)                                                                                                                      | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                | (15)           |
| 4.01.01.2.09 -<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                             |                                                                                                                           |                               |                                 | 2.463.115.64<br>4 |            | 2.505.366.18<br>8 |            | 2.548.461.74<br>4 |            | 2.421.693.54<br>4 |            | 2.632.727.52<br>4 |                     |                |
| Tersusunnya Dokumen<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit) | -                             | 12                              | 2.463.115.64<br>4 | 12         | 2.505.366.18<br>8 | 12         | 2.548.461.74<br>4 | 12         | 2.421.693.54<br>4 | 12         | 2.632.727.52<br>4 |                     |                |
|                                                                                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara<br>(Unit)                                                           | -                             | 50                              |                   | 50         |                   | 50         |                   | 50         |                   |            |                   |                     |                |
|                                                                                                                                                           | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya (Unit) | -                             | 16                              |                   | 16         |                   | 16         |                   | 16         |                   |            |                   |                     |                |
|                                                                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi<br>(Unit)                                  | -                             | 1                               |                   | 1          |                   | 1          |                   | 1          |                   |            |                   |                     |                |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                               |                                 |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                     |                |
| 4.01.01.2.09.0001 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan |                                                                                                                           |                               |                                 | 1.227.506.52<br>9 |            | 1.238.069.16<br>5 |            | 1.248.843.05<br>4 |            | 1.217.151.00<br>4 |            | 1.269.909.49<br>9 |                     |                |
| Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan                        | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya (Unit) | -                             | 16                              | 1.227.506.52<br>9 | 16         | 1.238.069.16<br>5 | 16         | 1.248.843.05<br>4 | 16         | 1.217.151.00<br>4 | 16         | 1.269.909.49<br>9 |                     |                |
| 4.01.01.2.09.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan        |                                                                                                                           |                               |                                 | 423.900.475       |            | 434.463.111       |            | 445.237.000       |            | 413.544.950       |            | 466.303.445       |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                             | (02)                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | -                   | 12                              | 423.900.475 | 12     | 434.463.111 | 12     | 445.237.000 | 12     | 413.544.950 | 12     | 466.303.445   |                  |            |
| 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                                                                  |                     |                                 | 72.695.525  |        | 83.258.161  |        | 94.032.050  |        | 62.340.000  |        | 115.098.495   |                  |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                        | -                   | 50                              | 72.695.525  | 50     | 83.258.161  | 50     | 94.032.050  | 50     | 62.340.000  | 50     | 115.098.495   |                  |            |
| 4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                                  |                     |                                 | 739.013.115 |        | 749.575.751 |        | 760.349.640 |        | 728.657.590 |        | 781.416.085   |                  |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  | -                   | 1                               | 739.013.115 | 1      | 749.575.751 | 1      | 760.349.640 | 1      | 728.657.590 | 1      | 781.416.085   |                  |            |
| 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |                                                                                                                  |                     |                                 | 929.359.469 |        | 961.047.377 |        | 993.369.044 |        | 898.292.894 |        | 1.056.568.379 |                  |            |
| Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan da operasional KDH dan WKDH                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | -                   | 2                               | 929.359.469 | 2      | 961.047.377 | 2      | 993.369.044 | 2      | 898.292.894 | 2      | 1.056.568.379 |                  |            |
|                                                                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | -                   | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |        |               |                  |            |
|                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       | -                   | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |        |               |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                  |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                       | (02)                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
|                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)        | -                   | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |                  |            |
| 4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |                                                                                                                  |                     |                                 | 192.648.419 |        | 203.211.055 |        | 213.984.944 |        | 182.292.894 |        | 235.051.389 |                  |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)                | -                   | 2                               | 192.648.419 | 2      | 203.211.055 | 2      | 213.984.944 | 2      | 182.292.894 | 2      | 235.051.389 |                  |            |
| 4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                  |                     |                                 | 266.355.525 |        | 276.918.161 |        | 287.692.050 |        | 256.000.000 |        | 308.758.495 |                  |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | -                   | 2                               | 266.355.525 | 2      | 276.918.161 | 2      | 287.692.050 | 2      | 256.000.000 | 2      | 308.758.495 |                  |            |
| 4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                                                                                                                  |                     |                                 | 70.355.525  |        | 80.918.161  |        | 91.692.050  |        | 60.000.000  |        | 112.758.495 |                  |            |
| Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)                       | -                   | 2                               | 70.355.525  | 2      | 80.918.161  | 2      | 91.692.050  | 2      | 60.000.000  | 2      | 112.758.495 |                  |            |
| 4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                                                                                                                  |                     |                                 | 400.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |        | 400.000.000 |                  |            |
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                               | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah                                              | -                   | 2                               | 400.000.000 | 2      | 400.000.000 | 2      | 400.000.000 | 2      | 400.000.000 | 2      | 400.000.000 |                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT         | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                            | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                    |                                                                                          |                               | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                     |                |
|                                                                                    |                                                                                          |                               | TARGE<br>T                      | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                     |                |
| (01)                                                                               | (02)                                                                                     | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                | (15)           |
|                                                                                    | dan Wakil Kepala Daerah<br>(Orang/Bulan)                                                 |                               |                                 |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                     |                |
| 4.01.01.2.12 - Fasilitas<br>Kerumahtanggaan<br>Sekretariat Daerah                  |                                                                                          |                               |                                 | 1.306.176.57<br>5 |            | 1.337.864.48<br>3 |            | 1.370.186.15<br>0 |            | 1.275.110.00<br>0 |            | 1.433.385.48<br>5 |                     |                |
| Tersedianya kebutuhan<br>rumah tangga sekretariat<br>daerah                        | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan (Paket) | -                             | 2                               | 1.306.176.57<br>5 | 2          | 1.337.864.48<br>3 | 2          | 1.370.186.15<br>0 | 2          | 1.275.110.00<br>0 | 2          | 1.433.385.48<br>5 |                     |                |
|                                                                                    | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Daerah yang Disediakan<br>(Paket)  | -                             | 1                               |                   |            |                   | 1          |                   | 1          |                   | 1          |                   |                     |                |
|                                                                                    | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah yang Disediakan<br>(Paket)       | -                             | 2                               |                   |            |                   | 2          |                   | 2          |                   | 2          |                   |                     |                |
| 4.01.01.2.12.0001 -<br>Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah       |                                                                                          |                               |                                 | 680.355.525       |            | 690.918.161       |            | 701.692.050       |            | 670.000.000       |            | 722.758.495       |                     |                |
| Tersedianya Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah                             | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah yang Disediakan<br>(Paket)       | -                             | 2                               | 680.355.525       | 2          | 690.918.161       | 2          | 701.692.050       | 2          | 670.000.000       | 2          | 722.758.495       |                     |                |
| 4.01.01.2.12.0002 -<br>Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil<br>Kepala Daerah |                                                                                          |                               |                                 | 565.465.525       |            | 576.028.161       |            | 586.802.050       |            | 555.110.000       |            | 607.868.495       |                     |                |
| Terlaksananya Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>Wakil Kepala Daerah          | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan (Paket) | -                             | 2                               | 565.465.525       | 2          | 576.028.161       | 2          | 586.802.050       | 2          | 555.110.000       | 2          | 607.868.495       |                     |                |
| 4.01.01.2.12.0003 -<br>Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Daerah  |                                                                                          |                               |                                 | 60.355.525        |            | 70.918.161        |            | 81.692.050        |            | 50.000.000        |            | 102.758.495       |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                    |                                                                                                           |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                    |                                                                                                           |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                               | (02)                                                                                                      | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)                            | -                   | 1                               | 60.355.525  | 1      | 70.918.161  | 1      | 81.692.050  | 1      | 50.000.000  | 1      | 102.758.495 |                  |            |
| 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi                                 |                                                                                                           |                     |                                 | 461.435.000 |        | 503.685.544 |        | 546.781.100 |        | 420.012.900 |        | 631.046.880 |                  |            |
| Tersusunnya dokumen tata organisasi pemerintah daerah              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)                                | -                   | 1                               | 461.435.000 | 1      | 503.685.544 | 1      | 546.781.100 | 1      | 420.012.900 | 1      | 631.046.880 |                  |            |
|                                                                    | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)                                      | -                   | 2                               |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |                  |            |
|                                                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)                                     | -                   | 8                               |             | 8      |             | 8      |             | 8      |             | 8      |             |                  |            |
|                                                                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | -                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   |                                                                                                           |                     |                                 | 146.181.325 |        | 156.743.961 |        | 167.517.850 |        | 135.825.800 |        | 188.584.295 |                  |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan         | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)                                     | -                   | 8                               | 146.181.325 | 8      | 156.743.961 | 8      | 167.517.850 | 8      | 135.825.800 | 8      | 188.584.295 |                  |            |
| 4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana    |                                                                                                           |                     |                                 | 73.153.825  |        | 83.716.461  |        | 94.490.350  |        | 62.798.300  |        | 115.556.795 |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)                                | -                   | 1                               | 73.153.825  | 1      | 83.716.461  | 1      | 94.490.350  | 1      | 62.798.300  | 1      | 115.556.795 |                  |            |
| 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi    |                                                                                                           |                     |                                 | 149.779.325 |        | 160.341.961 |        | 171.115.850 |        | 139.423.800 |        | 192.182.295 |                  |            |
| Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi          | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan                                                                    | -                   | 2                               | 149.779.325 | 2      | 160.341.961 | 2      | 171.115.850 | 2      | 139.423.800 | 2      | 192.182.295 |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                | BASELI NE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |         |             |         |               |         |             |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANG AN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|---------------|------------------|-------------|
|                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 2026                            |             | 2027    |             | 2028    |               | 2029    |             | 2030    |               |                  |             |
|                                                                                                      |                                                                                                           |                      | TARGE T                         | PAGU        | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU        | TARGE T | PAGU          |                  |             |
| (01)                                                                                                 | (02)                                                                                                      | (03)                 | (04)                            | (05)        | (06)    | (07)        | (08)    | (09)          | (10)    | (11)        | (12)    | (13)          | (14)             | (15)        |
|                                                                                                      | Reformasi Birokrasi (Dokumen)                                                                             |                      |                                 |             |         |             |         |               |         |             |         |               |                  |             |
| 4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                                                                                                           |                      |                                 | 92.320.525  |         | 102.883.161 |         | 113.657.050   |         | 81.965.000  |         | 134.723.495   |                  |             |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | -                    | 1                               | 92.320.525  | 1       | 102.883.161 | 1       | 113.657.050   | 1       | 81.965.000  | 1       | 134.723.495   |                  |             |
| 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                          |                                                                                                           |                      |                                 | 949.745.475 |         | 981.433.383 |         | 1.013.755.050 |         | 918.678.900 |         | 1.076.954.385 |                  |             |
| Terfasilitasinya layanan protokol dan komunikasi pimpinan                                            | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)                                                  | -                    | 6                               | 949.745.475 | 6       | 981.433.383 | 6       | 1.013.755.050 | 6       | 918.678.900 | 6       | 1.076.954.385 |                  |             |
|                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)                                                    | -                    | 27                              |             | 27      |             | 27      |               | 27      |             | 27      |               |                  |             |
|                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                             | -                    | 2                               |             | 2       |             | 2       |               | 2       |             | 2       |               |                  |             |
| 4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan                                                          |                                                                                                           |                      |                                 | 254.998.763 |         | 265.561.399 |         | 276.335.288   |         | 244.643.238 |         | 297.401.733   |                  |             |
| Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)                                                    | -                    | 27                              | 254.998.763 | 27      | 265.561.399 | 27      | 276.335.288   | 27      | 244.643.238 | 27      | 297.401.733   |                  |             |
| 4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   |                                                                                                           |                      |                                 | 589.531.525 |         | 600.094.161 |         | 610.868.050   |         | 579.176.000 |         | 631.934.495   |                  |             |
| Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)                                             | -                    | 2                               | 589.531.525 | 2       | 600.094.161 | 2       | 610.868.050   | 2       | 579.176.000 | 2       | 631.934.495   |                  |             |
| 4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  |                                                                                                           |                      |                                 | 105.215.187 |         | 115.777.823 |         | 126.551.712   |         | 94.859.662  |         | 147.618.157   |                  |             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                   | KETERANG<br>AN |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----|--|--|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                                                       |                |    |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                                                       |                |    |  |  |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (03)                          | (04)                            | (05)           | (06)       | (07)           | (08)       | (09)           | (10)       | (11)           | (12)       | (13)           | (14)                                                  | (15)           |    |  |  |
| Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan                              | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)                                                                                                                                                                                                                                                                | -                             | 6                               | 105.215.187    | 6          | 115.777.823    | 6          | 126.551.712    | 6          | 94.859.662     | 6          | 147.618.157    |                                                       |                |    |  |  |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                 | 24.608.366.484 |            | 25.100.533.814 |            | 25.602.544.490 |            | 26.114.595.380 |            | 26.636.887.287 |                                                       |                |    |  |  |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan                              | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)                                                                                                                                                                                                                                                     | -                             | 75                              | 18.809.981.761 | 80         | 18.957.581.761 | 85         | 19.108.184.911 | 90         | 19.261.800.178 | 95         | 19.418.487.748 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi |                |    |  |  |
| 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                 | 18.809.981.761 |            | 18.957.581.761 |            | 19.108.184.911 |            | 19.261.800.178 |            | 19.418.487.748 |                                                       |                |    |  |  |
| Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi urusan kesejahteraan rakyat        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                             | -                             | 50                              | 18.809.981.761 | 50         | 18.957.581.761 | 50         | 19.108.184.911 | 50         | 19.261.800.178 | 50         | 19.418.487.748 |                                                       |                |    |  |  |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | -                             | 23                              |                |            |                | 23         |                |            |                | 23         |                |                                                       |                | 23 |  |  |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)                                                                                    | -                             | 2                               |                |            |                | 2          |                |            |                | 2          |                |                                                       |                | 2  |  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 18.769.284.761 |        | 18.818.484.761 |        | 18.868.685.811 |        | 18.919.890.900 |        | 18.972.120.090 |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 50                              | 18.769.284.761 | 50     | 18.818.484.761 | 50     | 18.868.685.811 | 50     | 18.919.890.900 | 50     | 18.972.120.090 |                  |            |
| 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 20.328.600     |        | 69.528.600     |        | 119.729.650    |        | 170.934.739    |        | 223.163.929    |                  |            |
| Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | -                   | 23                              | 20.328.600     | 23     | 69.528.600     | 23     | 119.729.650    | 23     | 170.934.739    | 23     | 223.163.929    |                  |            |
| 4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 20.368.400     |        | 69.568.400     |        | 119.769.450    |        | 170.974.539    |        | 223.203.729    |                  |            |
| Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)                                                                                    | -                   | 2                               | 20.368.400     | 2      | 69.568.400     | 2      | 119.769.450    | 2      | 170.974.539    | 2      | 223.203.729    |                  |            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                        | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                            |                                                                      |                               | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                            |                                                                      |                               | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| (01)                                                                       | (02)                                                                 | (03)                          | (04)                            | (05)          | (06)       | (07)          | (08)       | (09)          | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)                | (15)           |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan                               | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)                    | -                             | 75                              | 4.926.586.308 | 80         | 5.123.386.308 | 85         | 5.324.190.508 | 90         | 5.529.010.864 | 95         | 5.737.927.624 |                     |                |
| 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan                              |                                                                      |                               |                                 | 4.852.763.308 |            | 5.000.363.308 |            | 5.150.966.458 |            | 5.304.581.725 |            | 5.461.269.295 |                     |                |
| Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)  | -                             | 1                               | 4.852.763.308 | 1          | 5.000.363.308 | 1          | 5.150.966.458 | 1          | 5.304.581.725 | 1          | 5.461.269.295 |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | -                             | 4                               |               | 4          |               | 4          |               | 4          |               | 4          |               |                     |                |
|                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)    | -                             | 5                               |               | 5          |               | 5          |               | 5          |               | 5          |               |                     |                |
| 4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan                     |                                                                      |                               |                                 | 4.565.366.508 |            | 4.614.566.508 |            | 4.664.767.558 |            | 4.715.972.647 |            | 4.768.201.837 |                     |                |
| Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)    | -                             | 5                               | 4.565.366.508 | 5          | 4.614.566.508 | 5          | 4.664.767.558 | 5          | 4.715.972.647 | 5          | 4.768.201.837 |                     |                |
| 4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                   |                                                                      |                               |                                 | 92.421.800    |            | 141.621.800   |            | 191.822.850   |            | 243.027.939   |            | 295.257.129   |                     |                |
| Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)  | -                             | 1                               | 92.421.800    | 1          | 141.621.800   | 1          | 191.822.850   | 1          | 243.027.939   | 1          | 295.257.129   |                     |                |
| 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                  |                                                                      |                               |                                 | 194.975.000   |            | 244.175.000   |            | 294.376.050   |            | 345.581.139   |            | 397.810.329   |                     |                |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | -                             | 4                               | 194.975.000   | 4          | 244.175.000   | 4          | 294.376.050   | 4          | 345.581.139   | 4          | 397.810.329   |                     |                |
| 4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                |                                                                      |                               |                                 | 73.823.000    |            | 123.023.000   |            | 173.224.050   |            | 224.429.139   |            | 276.658.329   |                     |                |
| Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)       | -                             | 1                               | 73.823.000    | 1          | 123.023.000   | 1          | 173.224.050   | 1          | 224.429.139   | 1          | 276.658.329   |                     |                |
| 4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                        |                                                                      |                               |                                 | 73.823.000    |            | 123.023.000   |            | 173.224.050   |            | 224.429.139   |            | 276.658.329   |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                                  |                     | 2026                            |             | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                   |                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                              | (02)                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)                   | -                   | 1                               | 73.823.000  | 1      | 123.023.000   | 1      | 173.224.050   | 1      | 224.429.139   | 1      | 276.658.329   |                  |            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Produk Hukum                                      | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)                             | -                   | 75                              | 871.798.415 | 80     | 1.019.565.745 | 85     | 1.170.169.071 | 90     | 1.323.784.338 | 95     | 1.480.471.915 |                  |            |
| 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                    |                                                                                  |                     |                                 | 871.798.415 |        | 1.019.565.745 |        | 1.170.169.071 |        | 1.323.784.338 |        | 1.480.471.915 |                  |            |
| Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                      | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)                   | -                   | 2                               | 871.798.415 | 2      | 1.019.565.745 | 2      | 1.170.169.071 | 2      | 1.323.784.338 | 2      | 1.480.471.915 |                  |            |
|                                                                                   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)                                | -                   | 653                             |             | 653    |               | 653    |               | 653    |               | 653    |               |                  |            |
|                                                                                   | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | -                   | 3                               |             | 3      |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               |                  |            |
| 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     |                                                                                  |                     |                                 | 508.444.800 |        | 557.644.800   |        | 607.845.850   |        | 659.050.939   |        | 711.280.129   |                  |            |
| Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah                                   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)                                | -                   | 653                             | 508.444.800 | 653    | 557.644.800   | 653    | 607.845.850   | 653    | 659.050.939   | 653    | 711.280.129   |                  |            |
| 4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum                                      |                                                                                  |                     |                                 | 212.320.000 |        | 261.520.000   |        | 311.721.050   |        | 362.926.139   |        | 415.155.329   |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum                                            | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)                   | -                   | 2                               | 212.320.000 | 2      | 261.520.000   | 2      | 311.721.050   | 2      | 362.926.139   | 2      | 415.155.329   |                  |            |
| 4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |                                                                                  |                     |                                 | 151.033.615 |        | 200.400.945   |        | 250.602.171   |        | 301.807.260   |        | 354.036.457   |                  |            |
| Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum       | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | -                   | 3                               | 151.033.615 | 3      | 200.400.945   | 3      | 250.602.171   | 3      | 301.807.260   | 3      | 354.036.457   |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH                                      | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                |                                                                                           |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                       |            |
|                                                                                |                                                                                           |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                       |            |
| (01)                                                                           | (02)                                                                                      | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                                                  | (15)       |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                 |                                                                                           |                     |                                 | 592.111.576 |        | 603.953.807 |        | 616.032.884 |        | 628.353.541 |        | 640.920.612 |                                                       |            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan                       | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)                               | -                   | 75                              | 168.081.137 | 80     | 171.081.137 | 85     | 174.081.137 | 90     | 177.081.137 | 95     | 180.081.137 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi |            |
| 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                            |                                                                                           |                     |                                 | 168.081.137 |        | 171.081.137 |        | 174.081.137 |        | 177.081.137 |        | 180.081.137 |                                                       |            |
| Terlaksananya pengendalian administrasi pembangunan                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)              | -                   | 1                               | 168.081.137 | 1      | 171.081.137 | 1      | 174.081.137 | 1      | 177.081.137 | 1      | 180.081.137 |                                                       |            |
|                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)           | -                   | 2                               |             |        |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |                                                       |            |
|                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | -                   | 2                               |             |        |             | 2      |             | 2      |             | 2      |             |                                                       |            |
| 4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                  |                                                                                           |                     |                                 | 39.160.000  |        | 40.160.000  |        | 41.160.000  |        | 42.160.000  |        | 43.160.000  |                                                       |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)           | -                   | 2                               | 39.160.000  | 2      | 40.160.000  | 2      | 41.160.000  | 2      | 42.160.000  | 2      | 43.160.000  |                                                       |            |
| 4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              |                                                                                           |                     |                                 | 41.380.000  |        | 42.380.000  |        | 43.380.000  |        | 44.380.000  |        | 45.380.000  |                                                       |            |
| Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)              | -                   | 1                               | 41.380.000  | 1      | 42.380.000  | 1      | 43.380.000  | 1      | 44.380.000  | 1      | 45.380.000  |                                                       |            |
| 4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                                                                                           |                     |                                 | 87.541.137  |        | 88.541.137  |        | 89.541.137  |        | 90.541.137  |        | 91.541.137  |                                                       |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan                                             | -                   | 2                               | 87.541.137  | 2      | 88.541.137  | 2      | 89.541.137  | 2      | 90.541.137  | 2      | 91.541.137  |                                                       |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                           | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                      |                                                                                      |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                      |                                                                                      |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                 | (02)                                                                                 | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
|                                                                      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)                                          |                     |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa  | Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)                                                     | -                   | 7                               | 300.143.531 | 8      | 302.985.762 | 9      | 306.064.839 | 9      | 309.385.496 | 9      | 312.952.567 |                  |            |
| 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                 |                                                                                      |                     |                                 | 300.143.531 |        | 302.985.762 |        | 306.064.839 |        | 309.385.496 |        | 312.952.567 |                  |            |
| Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)                 | -                   | 1                               | 300.143.531 | 1      | 302.985.762 | 1      | 306.064.839 | 1      | 309.385.496 | 1      | 312.952.567 |                  |            |
|                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | -                   | 30                              |             |        |             | 30     |             |        |             | 30     |             |                  |            |
|                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)                   | -                   | 1                               |             |        |             | 1      |             |        |             | 1      |             |                  |            |
| 4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa            |                                                                                      |                     |                                 | 149.323.200 |        | 150.323.200 |        | 151.323.200 |        | 152.323.200 |        | 153.323.200 |                  |            |
| Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)                 | -                   | 1                               | 149.323.200 | 1      | 150.323.200 | 1      | 151.323.200 | 1      | 152.323.200 | 1      | 153.323.200 |                  |            |
| 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  |                                                                                      |                     |                                 | 68.123.300  |        | 69.123.300  |        | 70.123.300  |        | 71.123.300  |        | 72.123.300  |                  |            |
| Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)                   | -                   | 1                               | 68.123.300  | 1      | 69.123.300  | 1      | 70.123.300  | 1      | 71.123.300  | 1      | 72.123.300  |                  |            |
| 4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                                      |                     |                                 | 82.697.031  |        | 83.539.262  |        | 84.618.339  |        | 85.938.996  |        | 87.506.067  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                           | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                      |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                      |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                                 | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)                                 | -                   | 30                              | 82.697.031  | 30     | 83.539.262  | 30     | 84.618.339  | 30     | 85.938.996  | 30     | 87.506.067  |                  |            |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian                                                              | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)                              | -                   | 75                              | 123.886.908 | 80     | 129.886.908 | 85     | 135.886.908 | 90     | 141.886.908 | 95     | 147.886.908 |                  |            |
| 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                         |                                                                                                                      |                     |                                 | 95.236.908  |        | 98.236.908  |        | 101.236.908 |        | 104.236.908 |        | 107.236.908 |                  |            |
| Terlaksananya kebijakan dibidang perekonomian                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)                                        | 1                   | 1                               | 95.236.908  | 1      | 98.236.908  | 1      | 101.236.908 | 1      | 104.236.908 | 1      | 107.236.908 |                  |            |
|                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | -                   | 1                               |             |        |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)                                              | -                   | 1                               |             |        |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                      |                     |                                 | 7.850.000   |        | 8.850.000   |        | 9.850.000   |        | 10.850.000  |        | 11.850.000  |                  |            |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | -                   | 1                               | 7.850.000   | 1      | 8.850.000   | 1      | 9.850.000   | 1      | 10.850.000  | 1      | 11.850.000  |                  |            |
| 4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                      |                     |                                 | 81.720.800  |        | 82.720.800  |        | 83.720.800  |        | 84.720.800  |        | 85.720.800  |                  |            |
| Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)                                              | -                   | 1                               | 81.720.800  | 1      | 82.720.800  | 1      | 83.720.800  | 1      | 84.720.800  | 1      | 85.720.800  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                   | BASELI NE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |         |            |         |            |         |            |         |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANG AN |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------------|-------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                      | 2026                            |            | 2027    |            | 2028    |            | 2029    |            | 2030    |            |                  |             |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                      | TARGE T                         | PAGU       | TARGE T | PAGU       | TARGE T | PAGU       | TARGE T | PAGU       | TARGE T | PAGU       |                  |             |
| (01)                                                                | (02)                                                                                                                                                                                                         | (03)                 | (04)                            | (05)       | (06)    | (07)       | (08)    | (09)       | (10)    | (11)       | (12)    | (13)       | (14)             | (15)        |
| 4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 | 5.666.108  |         | 6.666.108  |         | 7.666.108  |         | 8.666.108  |         | 9.666.108  |                  |             |
| Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)                                                                                                                                | 1                    | 1                               | 5.666.108  | 1       | 6.666.108  | 1       | 7.666.108  | 1       | 8.666.108  | 1       | 9.666.108  |                  |             |
| 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 | 28.650.000 |         | 31.650.000 |         | 34.650.000 |         | 37.650.000 |         | 40.650.000 |                  |             |
| Meningkatnya Pemantauan Sumber Daya Alam                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | -                    | 1                               | 28.650.000 | 1       | 31.650.000 | 1       | 34.650.000 | 1       | 37.650.000 | 1       | 40.650.000 |                  |             |
|                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)                   | -                    | 1                               |            | 1       |            | 1       |            | 1       |            | 1       |            |                  |             |
|                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)                | -                    | 1                               |            | 1       |            | 1       |            | 1       |            | 1       |            |                  |             |
| 4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 | 8.100.000  |         | 9.100.000  |         | 10.100.000 |         | 11.100.000 |         | 12.100.000 |                  |             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                        | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |            |            |            |            | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANG<br>AN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            | 2030       |            |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | TARGE<br>T                      | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       | TARGE<br>T | PAGU       |                     |                |
| (01)                                                                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                                                                                 | (03)                          | (04)                            | (05)       | (06)       | (07)       | (08)       | (09)       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       | (14)                | (15)           |
| Pertanian, Kehutanan,<br>Kelautan, dan Perikanan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                |
| Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan Evaluasi<br>Kebijakan Urusan<br>Pertanian, Pangan,<br>Kehutanan, Kelautan dan<br>Perikanan, Perdagangan,<br>Perindustrian, KUKM,<br>Penanaman Modal, Tenaga<br>Kerja | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>dan Evaluasi Kebijakan<br>Urusan Pertanian, Pangan,<br>Kehutanan, Kelautan dan<br>Perikanan, Perdagangan,<br>Perindustrian, KUKM,<br>Penanaman Modal, Tenaga<br>Kerja (Dokumen) | -                             | 1                               | 8.100.000  | 1          | 9.100.000  | 1          | 10.100.000 | 1          | 11.100.000 | 1          | 12.100.000 |                     |                |
| 4.01.03.2.04.0002 -<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan<br>Lingkungan Hidup                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 | 9.350.000  |            | 10.350.000 |            | 11.350.000 |            | 12.350.000 |            | 13.350.000 |                     |                |
| Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan Evaluasi<br>Kebijakan Urusan<br>Pertambangan dan Sumber<br>Daya Mineral, Lingkungan<br>Hidup, Kominfo,<br>Perhubungan, Statistik,<br>Persandian                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>dan Evaluasi Kebijakan<br>Urusan Pertambangan dan<br>Sumber Daya Mineral,<br>Lingkungan Hidup,<br>Kominfo, Perhubungan,<br>Statistik, Persandian<br>(Dokumen)                   | -                             | 1                               | 9.350.000  | 1          | 10.350.000 | 1          | 11.350.000 | 1          | 12.350.000 | 1          | 13.350.000 |                     |                |
| 4.01.03.2.04.0003 -<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Energi<br>dan Air                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 | 11.200.000 |            | 12.200.000 |            | 13.200.000 |            | 14.200.000 |            | 15.200.000 |                     |                |
| Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan Evaluasi<br>Kebijakan Urusan Energi<br>dan Air, Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman,<br>Pertanahan                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>dan Evaluasi Kebijakan<br>Urusan Energi dan Air,<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman,<br>Pertanahan (Dokumen)                | -                             | 1                               | 11.200.000 | 1          | 12.200.000 | 1          | 13.200.000 | 1          | 14.200.000 | 1          | 15.200.000 |                     |                |



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur sosial yang inklusif, memperluas akses dan perlindungan sosial, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan stakeholder dalam rangka mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis kondisi daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, musrenbang, serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan, berikut tabel rincian sub kegiatan yang akan dijalankan.

Tabel. 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

| NO                                                    | PROGRAM PRIORITAS                                       | OUTCOME                                       | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                    | KETERANGAN      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (01)                                                  | (02)                                                    | (03)                                          | (04)                                                                                                      | (05)            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kab. Sigi |                                                         |                                               |                                                                                                           |                 |
| 1.                                                    | 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan | 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                 |                 |
|                                                       |                                                         |                                               | 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | PUP No 10       |
|                                                       |                                                         |                                               | 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | PUP No 6        |
|                                                       |                                                         |                                               | 4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | PUP No 6 dan 10 |

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan



dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 mencakup lima indikator utama, yaitu **Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pelayanan Publik, Nilai Sakip Kabupaten, Indeks Kualitas Kebijakan dan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).**

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan dan penerapan inovasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

| N<br>O | INDIKATOR                                                | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |             |             |             | KETERA<br>NGAN |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|        |                                                          |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028        | 2029        | 2030        |                |
| (01)   | (02)                                                     | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)        | (09)        | (10)        | (11)           |
| 1.     | Indeks Pelayanan Publik.                                 | Indeks | -                         | 80,3         | 81,1  | 81,91 | 82,73       | 83,56       | 84,39       |                |
| 2.     | Indeks Reformasi Hukum                                   | Indeks | -                         | 87,83        | 88,71 | 89,59 | 90,49       | 91,4        | 92,31       |                |
| 3.     | Nilai SAKIP Kabupaten                                    | Nilai  | B                         | BB           | BB    | BB    | BB          | BB          | BB          |                |
| 4.     | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)                          | Nilai  | Baik                      | Baik         | Baik  | Baik  | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |                |
| 5.     | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Nilai  | 3,35                      | 3,38         | 3,4   | 3,43  | 3,46        | 3,5         | 3,53        |                |

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

| NO   | INDIKATOR                                                                                                         | STATUS  | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |             |             |             | KET. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
|      |                                                                                                                   |         |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028        | 2029        | 2030        |      |
| (01) | (02)                                                                                                              | (03)    | (04)   | (05)                | (06)         | (07)  | (08)  | (09)        | (10)        | (11)        | (12) |
| 1.   | Indeks Pelayanan Publik.                                                                                          | positif | Indeks | -                   | 80,3         | 81,1  | 81,91 | 82,73       | 83,56       | 84,39       |      |
| 2.   | Nilai SAKIP Kabupaten                                                                                             | positif | Nilai  | B                   | BB           | BB    | BB    | BB          | BB          | BB          |      |
| 3.   | Indeks Reformasi Hukum                                                                                            | positif | Indeks | -                   | 87,83        | 88,71 | 89,59 | 90,49       | 91,4        | 92,31       |      |
| 4.   | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)                                                                                   | positif | Nilai  | Baik                | Baik         | Baik  | Baik  | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |      |
| 5.   | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)                                                          | positif | Nilai  | 3,35                | 3,38         | 3,4   | 3,43  | 3,46        | 3,5         | 3,53        |      |
| 6.   | Persentase peningkatan tata kelola di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa | positif | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100         | 100         | 100         |      |
| 7.   | Persentase peningkatan tata kelola di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum                    | positif | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100         | 100         | 100         |      |



## **BAB V PENUTUP**

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang berkualitas, yang mencerminkan skala prioritas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan berpeluang memberikan partisipasi masyarakat dan dapat menjamin transparansi.

Perencanaan sebagai prosesi awal dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Disisi lain untuk mewujudkan suatu perencanaan yang memenuhi kriteria diatas, terkendala dengan kemampuan sumberdaya manusia sebagai aparat perencana. Untuk itu sangat diperlukan konsolidasi internal Sekretariat Daerah yang berkesinambungan.

Semoga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan yaitu "KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA ".

Sigi, 30 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. NUIM HAYAT, MM**  
**NIP. 19690614 199903 1 007**